

# RENSTRA

Rencana Strategis  
Perubahan Tahun 2016-2021



**BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
BAPPEDA KOTA BANJARBARU



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Bappeda sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bappeda diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Bappeda tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kota yaitu RPJMD Kota Banjarbaru 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda adalah dokumen perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Banjarbaru yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Banjarbaru untuk masa waktu lima tahun kedepan. Renstra ini berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dalam bentuk Perda.

Renstra Bappeda Kota Banjarbaru berfungsi sebagai alat penerjemah dan pengendali dalam sinkronisasi dan sinergitas berbagai tujuan dan sasaran pembangunan secara nasional dan regional. Renstra ini terkait dengan tugas dan fungsi perencanaan yang diwujudkan dalam rencana kerja Bappeda selama lima tahun kedepan. Selain itu, renstra juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap evaluasi kinerja Bappeda.

Proses penyusunan Renstra Bappeda berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Secara garis besar tahapan penyusunan terdiri dari proses persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan renstra, penyusunan rancangan akhir renstra, dan penetapan Renstra. Dalam tahap persiapan, proses dimulai dengan pembentukan tim penyusun, penyusunan agenda kerja, serta pengumpulan data dan informasi. Dalam tahap penyusunan rancangan Renstra, dilakukan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Bappeda, *review* Renstra Bappenas dan Bappeprov Kalimantan Selatan, penelaahan RTRW Kota Banjarbaru, analisis terhadap dokumen KLHS, perumusan isu strategis, serta perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran jangka menengah Bappeda. Setelah rancangan Renstra Bappeda Kota Banjarbaru tersusun, dilaksanakan forum SKPD untuk mengkomunikasikan rancangan renstra atas kebutuhan pelayanan lima tahun mendatang, serta memperoleh penajaman dan penyepakatan. Setelah mendapat evaluasi dalam forum SKPD, rancangan renstra disajikan dalam sistematika penulisan yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Selanjutnya, rancangan Renstra dikaji ulang terhadap RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 untuk mempertajam

keselarasannya. Selain itu, rancangan Renstra kembali dibahas dengan unit kerja dalam Bappeda. Hasilnya disajikan dalam rancangan akhir Renstra. Sebagai tahap akhir, rancangan ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

Renstra Bappeda yang merupakan perencanaan jangka menengah Bappeda memiliki keterkaitan dengan perencanaan pembangunan lain ditingkat nasional, provinsi, ataupun SKPD. Renstra merupakan komitmen Bappeda yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan kota Banjarbaru serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Banjarbaru yaitu ‘ **Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter**’.

Renstra Bappeda ini menindaklanjuti program-program dalam RPJMD dengan menetapkan berbagai kegiatan pembangunan. Semua indikator kinerja dalam RPJMD yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi Bappeda harus masuk dalam Renstra Bappeda. Hal ini menunjukkan bahwa Renstra Bappeda mendukung berbagai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu Renstra Bappeda menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Bappeda selanjutnya.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, PJMD dan RKPD, yang telah diundangkan oleh KemenkumHAM pada tanggal 25 September 2017 pada Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kalimantan Selatan 2005-2025.
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035:



20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru Tahun 2014 -2034;
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bappeda adalah mewujudkan dokumen perencanaan Bappeda Kota Banjarbaru yang berkualitas, yang dapat menjadi arahan dan pedoman umum bagi Bappeda Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam kurun waktu 5 tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2016 – 2021.

Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kota Banjarbaru adalah :

1. Menerjemahkan berbagai substansi perencanaan dalam RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda.
2. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, target, program pembangunan, dan kegiatan yang direncanakan oleh Bappeda untuk dilaksanakan pada periode tahun 2016-2021.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Banjarbaru.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kota Banjarbaru 2016-2021 didasarkan pada aturan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017.

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Memaparkan tentang pengertian Renstra, Fungsi Renstra, proses penyusunan Renstra, dan keterkaitan Renstra Bappeda dengan RPJMD Kota Banjarbaru, Renstra Bappenas, Renstra Bappeprov Kalimantan Selatan, dan Renja SKPD. Selain itu, juga memaparkan mengenai landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Renstra Bappeda Kota Banjarbaru tahun 2016-2021.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Memaparkan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Bappeda, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan, kinerja keuangan, tantangan dan peluang pelayanan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya dan Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Memaparkan tentang permasalahan pelayanan Bappeda berdasarkan tugas dan fungsi, berdasarkan visi dan misi kepala daerah, berdasarkan telaah Renstra Bappenas dan Bappeprov Kalimantan Selatan, berdasarkan telaah RTRW dan KLHS.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memaparkan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yang dijabarkan kedalam Tujuan dan sasaran. Termasuk penetapan indikator sasaran dalam mengkonjretkan gerak pembangunan yang akan dilaksanakan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memaparkan tentang rumusan pernyataan startegi dan arah kebijakan Bappeda lima tahun mendatang berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam bab IV.



**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memamaparkan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bappeda.

**BAB VII KINERJA PENYELENGARAKAN BIDANG URUSAN**

Memaparkan tentang indikator kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Bappeda ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

Memaparkan tentang penutup penyusunan renstra yang ditandatangani oleh kepala Bappeda.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

#### 2.1 Struktur Organisasi

Sebagai bagian dari Organisasi Pemerintah Kota Banjarbaru, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) merupakan badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan mempunyai tugas untuk membantu Walikota dalam pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 58 tahun 2016, Bappeda mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, dan penelitian dan pengembangan;
- b. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;
- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, serta Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

##### 1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan.

Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. Perumusan, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi dan validasi kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;



- c. Perumusan, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi dan validasi kebijakan bidang fisik prasarana;
- d. Perumusan, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi dan validasi kebijakan bidang ekonomi dan sosial budaya;
- e. Perumusan, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi dan validasi kebijakan bidang penyusunan program dan evaluasi; dan
- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan;

## **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, administrasi perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya;

## **3. Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi**

Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan, forum satuan kerja perangkat daerah, menyusun rencana pembangunan, kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara, Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program di bidang Penyusunan Program dan Evaluasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Penyiapan kegiatan musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c. Pengkoordinasian program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- d. Penyusunan dokumen perencanaan daerah;
- e. Pengkoordinasian, penyusunan anggaran tingkat kota;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian pelaksanaan pembangunan daerah;

#### **4. Bidang Fisik Prasarana**

Bidang Fisik Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik prasarana wilayah, sumber daya alam, permukiman dan lingkungan hidup. Bidang Fisik Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program di bidang Fisik Prasarana dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang sarana prasarana wilayah, permukiman, perhubungan, komunikasi, informatika dan lingkungan hidup;
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pembangunan di bidang sarana prasarana wilayah, permukiman, perhubungan, komunikasi, informatika dan lingkungan hidup;

#### **5. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya**

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan dalam bidang Ekonomi dan Sosial Budaya.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program di bidang Ekonomi dan Sosial Budaya di dan Pengembangan Daerah;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan dibidang ekonomi dan sosial budaya;
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pembangunan dibidang ekonomi dan sosial budaya;

#### **6. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian, pengembangan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penelitian, pengembangan serta mengadakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan dan isu aktual. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

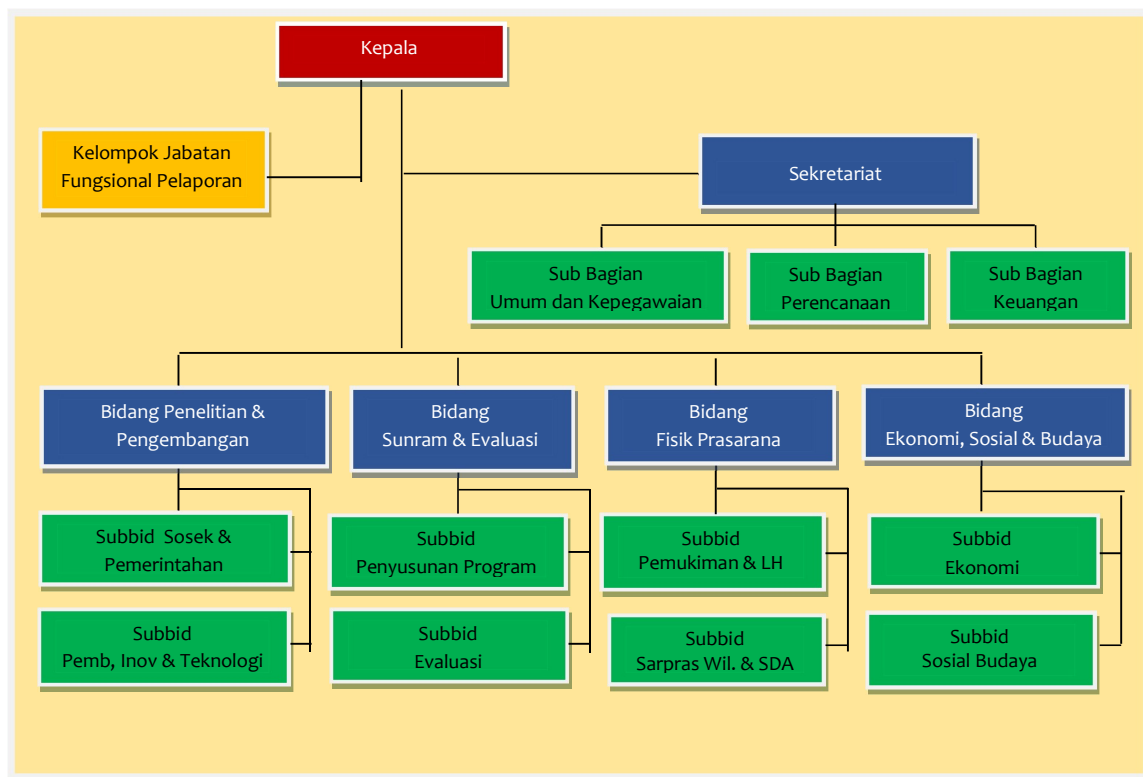
- a. Penyusunan program dibidang Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Penyusunan kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi daerah;



- d. Pengkoordinasian dan kerjasama penelitian, pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kota serta membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan Pemerintah Pusat/Provinsi;

Gambaran Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Struktur organisasi Bappeda



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Keadaan Pegawai Bappeda Kota Banjarbaru menurut Eselon dan Golongan dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Keadaan Pegawai Sesuai Eselon dan Golongan**

| No | Pendidikan | Jumlah |    | Golongan | Jumlah |    | Eselon | Jumlah |    |
|----|------------|--------|----|----------|--------|----|--------|--------|----|
|    |            | Pr     | Lk |          | Pr     | Lk |        | Pr     | Lk |
| 1  | SD         | -      | -  | II/c     | 1      | -  | IV/a   | 7      | 4  |
| 2  | SLTP       | -      | -  | II/d     | 1      | -  | III/b  | 1      | 3  |
| 3  | SLTA       | 2      | 1  | III/a    | 3      | 1  | III/a  | 1      | -  |
| 4  | D-I        | -      | -  | III/b    | 5      | 6  | II/b   | -      | 1  |
| 5  | D-II       | -      | -  | III/c    | 5      | 4  |        |        |    |
| 6  | D-III      | 1      | -  | III/d    | 1      | 2  |        |        |    |
| 7  | D-IV       | -      | -  | IV/a     | 2      | 3  |        |        |    |
| 8  | S-1        | 11     | 8  | IV/b     | -      | 2  |        |        |    |
| 9  | S-2        | 6      | 7  | IV/c     | -      | -  |        |        |    |
|    | Jumlah     | 20     | 16 | Jumlah   | 18     | 18 | Jumlah | 9      | 8  |

Sumber : Data diolah, Bappeda Tahun 2018

Menurut jenjang pendidikan pegawai Bappeda Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Pegawai Bappeda Sesuai Jenjang Pendidikan**

| Jumlah Pegawai ( PNS ) menurut Jenjang Pendidikan    |      |      |    |      |     |    |    |    |        |
|--|------|------|----|------|-----|----|----|----|--------|
| SD   | SLTP | SLTA | D1 | DIII | DIV | S1 | S2 | S3 | Jumlah |
| -  | -    | 3    | -  | 1    | -   | 19 | 13 | -  | 36     |
| Jumlah Pegawai ( PTT/TK ) menurut Jenjang Pendidikan |      |      |    |      |     |    |    |    |        |
| SD   | SLTP | SLTA | D1 | DIII | DIV | S1 | S2 | S3 | Jumlah |
| -  | -    | 2    | -  | 2    | -   | 11 | -  | -  | 15     |

Sumber : Data diolah, Bappeda Tahun 2018



Pegawai Bappeda Kota Banjarbaru di tahun 2018 sebanyak 52 orang yang terdiri atas 37 orang PNS dan 15 orang Tenaga Kontrak, dengan daftar pegawai dan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Daftar Pegawai sesuai Jabatan**

| No | Uraian                                 | Nama Jabatan                                    | Nama Pejabat                     |
|----|--|---|----------------------------------|
| 1. | Kepala                                 | Kepala Bappeda                                  | Kanafi, S.IP, MM                 |
| 2. | Sekretariat                            | Sekretaris                                      | Tri Wijayanti, S.Hut., MT        |
|    |  | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian          | Liliana Ningrati, SE             |
|    |  | Pengadministrasian Umum                         | Yulia Kurniati, S.Pt             |
|    |  | Pengadministrasian Kepegawaian                  | Fahmi, S.H.I                     |
|    |  | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris            | Fakhrizal Rusadi, S.Kom, MM      |
|    |  | Pengelola Sarana dan Prasarana Aparatur         | Salmiah, SE                      |
|    |  | Pengadministrasi Umum                           | Hj. Afrian Miftaql Hudyawati, SH |
|    |  | Pramu Bakti                                     | Ade Fithri Sabar, S.Pi           |
|    |  | Pramu Bakti                                     | Devy Yuliani, S.Pi               |
|    |  | Pengadministrasi Persuratan                     | M. Zainal Alamsyah, SE           |
|    |  | Pengadministrasi Kepegawaian                    | Muhammad Ramadhana Wanadhie      |
|    |  | Pramu Bakti                                     | Junita Akhrina                   |
|    |  | Kepala Sub Bagian Perencanaan                   | Maureen Rizqi Ramadhany, SE      |
|    |  | Pengelola Bahan Perencana                       | Arief Rahman Hakim, SE           |
|    |  | Pengadministrasi Perencanaan dan Program        | Meridha Marikh, SE               |
|    |  | Kepala Sub Bagian Keuangan                      | Rahmi Fahrina, SE, MM            |
|    |  | Verifikator Keuangan                            | Hj. Mun'imah                     |
|    |  | Bendahara                                       | Khalid Fitri, SE                 |
|    |  | Pengelola Gaji                                  | Fitriyani, SE                    |
|    |  | Yennita Alfadina, A.Md                          | Pengadministrasian Keuangan      |
| 3. | Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi | Kepala Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi   | Drs. Thaufik Hidayat, M.Eng      |
|    |  | Kepala Sub Bidang Penyusunan Program            | Bambang Supriyadi, SE.,ME        |
|    |  | Pengelola Pelaksanaan Program dan Anggaran      | Julius Heryadi, SE               |
|    |  | Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran | Astarini Dewi, SE                |
|    |  | Kepala Sub Bidang Evaluasi                      | Muhammad Aprian Noor.,S.Hut      |

| No | Uraian                             | Nama Jabatan   | Nama Pejabat                                   |
|----|------------------------------------|--|--|
|    |                                    | Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran          | Noor Rafikah, SE                               |
|    |                                    | Pengelola Monitoring dan Evaluasi                              | Noor Effendi, S.AP                             |
|    |                                    | Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran     | Alpi Hairin                                    |
| 4. | Bidang Fisik dan Prasarana         | Kepala Bidang Fisik dan Prasarana                              | Akhmad Syahidan, S.Pi.,M.Ec.Dev                |
|    |                                    | Kepala Sub Bidang Sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air | Eryek Triandoko, SP.,MS                        |
|    |                                    | Pengelola Sumber Daya Air                                      | Herry Fuziyanto, A.Md                          |
|    |                                    | Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik                           | Siti Mariana, ST                               |
|    |                                    | Kepala Sub Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup               | Rina Setyati, S.Si.,M.PA                       |
|    |                                    | Ahmad Haditya Pratama, ST                                      | Pengelola Rencana Pekerjaan Umum dan Perumahan |
|    |                                    | Fikri Rizky Ilhami, A.Md                                       | Pengelola Informasi Lingkungan                 |
| 5. | Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya   | Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya                        | Hj. Elda Rusmiladewi, S.Hut.,MT.,MA            |
|    |                                    | Kepala Sub Bidang Sosial Budaya                                | Noor Iwansyah, ST., MT                         |
|    |                                    | Analisis Sosial Budaya   | H. Agus Firdaus                                |
|    |                                    | Pengadministrasi Umum  | Qory Suriadi Puteri, SE                        |
|    |                                    | Kepala Sub Bidang Ekonomi                                      | Isnani Zain, SP                                |
|    |                                    | Analisis Perekonomian  | Resita Galis Rositaria, S.AB                   |
|    |                                    | Pengolah Data Ekonomi  | Doddy Kurniawan, S.IP                          |
| 6. | Bidang Penelitian dan Pengembangan | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan                      | Ir.Muhammad Barzani                            |
|    |                                    | Kepala Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan              | Hairina Yulianti, S.Sos                        |
|    |                                    | Pengelola Rencana Penelitian Pengembangan                      | Annisa Chairuswa Nurfaulin, S.I.Kom            |
|    |                                    | Kepala Sub Bidang Pembangunan, Evaluasi dan Teknologi          | Wulan Purwaningrum, ST.,M.AP                   |
|    |                                    | Pengadministrasian, Evaluasi dan Kerjasama Penelitian          | Mailia Yusantina                               |
| 7  | Pejabat Fungsional                 | Perencana Madya  | Agus Yana, SP, M.Si                            |

Sumber : Data diolah, Bappeda Tahun 2018

Sumber daya Asset badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru disajikan dalam tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4  
Data Sarana dan Prasarana

| No | Spesifikasi Barang, Jenis dan Nama Barang       | Satuan | Jumlah Barang |
|----|---|--------|---------------|
| 1  | Bangunan Gedung Kantor Permanen                 | Unit   | 1             |
| 2  | Staion Wagon                                    | Unit   | 1             |
| 3  | Sepeda Motor                                    | Unit   | 10            |
| 4  | Global Positioning System (GPS)                 | Buah   | 2             |
| 5  | Mesin Ketik Manual Portable (11-13)             | Buah   | 3             |
| 6  | Mesin Ketik Manual Standar (14-16)              | Buah   | 5             |
| 7  | Mesin Ketik Elektronik                          | Buah   | 3             |
| 8  | Lemari Besi                                     | Buah   | 18            |
| 9  | Rak Besi/Metal                                  | Buah   | 2             |
| 10 | Rak Kayu  | Buah   | 4             |
| 11 | Filling Besi/Metal                              | Buah   | 27            |
| 12 | Brand Kas                                       | Buah   | 1             |
| 13 | Lemari Kaca                                     | Buah   | 9             |
| 14 | Papan Visuil                                    | Buah   | 20            |
| 15 | Perkakas Kantor (penyekat Ruamgan)              | Buah   | 1             |
| 16 | Alat Penghancur Kertas                          | Buah   | 1             |
| 17 | Papan Pengumuman                                | Buah   | 1             |
| 18 | White Board                                     | Buah   | 4             |
| 19 | Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) - Staples Besar | Unit   | 1             |
| 20 | Genset  | Buah   | 1             |
| 21 | LCD Proyektor                                   | Buah   | 4             |
| 22 | Gantungan koran                                 | Buah   | 1             |
| 23 | Lampu Penerangan                                | Buah   | 3             |
| 24 | Lemari Kayu                                     | Buah   | 4             |
| 25 | Lemari Kayu                                     | Set    | 1             |
| 26 | Meja Rapat                                      | Buah   | 17            |
| 27 | Meja Reseption                                  | Buah   | 2             |
| 28 | Kursi Rapat                                     | Buah   | 157           |
| 29 | Kursi Tamu                                      | Buah   | 3             |
| 30 | Kursi Putar                                     | Buah   | 14            |
| 31 | Kursi Biasa                                     | Buah   | 5             |
| 32 | Kursi Lipat                                     | Buah   | 86            |
| 33 | Meja Komputer                                   | Buah   | 9             |
| 34 | Tikar   | Buah   | 9             |
| 35 | Meja Biro                                       | Buah   | 28            |

| No | Spesifikasi Barang, Jenis dan Nama Barang               | Satuan | Jumlah Barang |
|----|---|--------|---------------|
| 36 | Sofa  | Buah   | 5             |
| 37 | Kaca Riben  | Buah   | 6             |
| 38 | Lemari Pakaian  | Buah   | 1             |
| 39 | Kursi Plastik   | Buah   | 4             |
| 40 | Gordyn  | Meter  | 399           |
| 41 | Gordyn  | Set    | 1             |
| 42 | Karpet  | Buah   | 5             |
| 43 | Karpet  | Meter  | 12            |
| 44 | Jam Elektronik  | Buah   | 1             |
| 45 | Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner                      | Buah   | 2             |
| 46 | Tempat Sampah   | Buah   | 4             |
| 47 | Lemari Es   | Buah   | 2             |
| 48 | AC Unit   | Buah   | 8             |
| 49 | Kipas Angin   | Buah   | 7             |
| 50 | Televisi  | Buah   | 9             |
| 51 | Loudspeaker   | Buah   | 4             |
| 52 | Wireless  | Buah   | 3             |
| 53 | Unit Power Supply                                       | Buah   | 1             |
| 54 | Stabilisator  | Buah   | 1             |
| 55 | Tustel  | Buah   | 5             |
| 56 | Tangga Alumunium  | Buah   | 1             |
| 57 | Kaca Hias   | Buah   | 1             |
| 58 | Dispenser   | Buah   | 1             |
| 59 | Mimbar/Podium   | Buah   | 1             |
| 60 | Lambang Instansi  | Buah   | 1             |
| 61 | Tandon Air  | Buah   | 1             |
| 62 | Alat Pemadam Portable                                   | Buah   | 4             |
| 63 | Local Area Network (LAN)                                | Set    | 1             |
| 64 | P.C Unit/ Komputer PC                                   | Buah   | 20            |
| 65 | Lap Top   | Buah   | 9             |
| 66 | Note Book   | Buah   | 13            |
| 67 | Plotter   | Buah   | 1             |
| 68 | Hard Disk   | Buah   | 2             |
| 69 | Flashdisk   | Buah   | 2             |
| 70 | Printer   | Buah   | 28            |
| 71 | Peralatan Personal Komputer Lain-lain (monitor display) | Buah   | 1             |
| 72 | UPS   | Unit   | 5             |
| 73 | Harddisk Internal                                       | Buah   | 1             |
| 74 | Harddisk Eksternal                                      | Buah   | 3             |
| 75 | Memory (RAM)  | Buah   | 2             |

| No  | Spesifikasi Barang, Jenis dan Nama Barang        | Satuan | Jumlah Barang |
|-----|--|--------|---------------|
| 76  | Server (jaringan)                                | Set    | 1             |
| 77  | Router   | Unit   | 1             |
| 78  | Hub  | Buah   | 3             |
| 79  | Modem  | Buah   | 2             |
| 80  | Peralatan Jaringan Lain-lain (Jaringan Komputer) | Set    | 1             |
| 81  | Switch Hub                                       | Unit   | 2             |
| 82  | Wireless Access Point                            | Buah   | 4             |
| 83  | Meja Kerja Pejabat Eselon II                     | Buah   | 1             |
| 84  | Meja Kerja Pejabat Eselon III                    | Buah   | 5             |
| 85  | Meja Kerja Pejabat Eselon IV                     | Buah   | 2             |
| 86  | Meja Kerja                                       | Buah   | 32            |
| 87  | Kursi Kerja Pejabat Eselon II                    | Buah   | 2             |
| 88  | Kursi Kerja Pejabat Eselon III                   | Buah   | 9             |
| 89  | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV                    | Buah   | 12            |
| 90  | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural               | Buah   | 6             |
| 91  | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II   | Buah   | 2             |
| 92  | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II          | Set    | 1             |
| 93  | Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II              | Buah   | 3             |
| 94  | Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis                 | Buah   | 2             |
| 95  | Proyektor + Attachment                           | Set    | 2             |
| 96  | Audio Amplifier                                  | Buah   | 1             |
| 97  | Microphone/Wireless Mic                          | Set    | 3             |
| 98  | Uninterruptible Power Supply (UPS)               | Buah   | 3             |
| 99  | Digital Audio Tape Recorder                      | Buah   | 2             |
| 100 | Alat Penyimpan Data (CD)                         | Buah   | 1             |
| 101 | Sound System                                     | Set    | 1             |
| 102 | Pesawat Telephone                                | Buah   | 1             |
| 103 | Facsimile  | Buah   | 2             |
| 105 | CCTV   | Set    | 1             |
| 106 | Teralis  | Set    | 1             |
| 107 | Kanopi   | set    | 1             |
| 108 | Bangunan Taman                                   | macam  | 6             |
| 109 | Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA      | Set    | 1             |
| 110 | Peta Citra Satelit                               | Buah   | 2             |
| 111 | Peta Udara                                       | Set    | 1             |



### **2.3 Kinerja Pelayanan Daerah**

Kinerja pelayanan Bappeda Kota Banjarbaru selama periode renstra 2011 hingga 2015 tersaji dalam tabel 2.5, sedangkan untuk kinerja pengelolaan keuangan tersaji dalam Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda  
Tahun 2011-2015

| No  | Indikator Kinerja Sesuai Target dan Fungsi              | Targ et IKK | Targ et Indikator Lain nya | Target Renstra Tahun ke- |         |             |                   |              | Realisasi Capaian Tahun ke- |          |             |                   |              | Rasio Capaian Tahun ke- |      |      |       |         |
|-----|---|-------------|----------------------------|--------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------------------|----------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------|------|------|-------|---------|
|     |   |             |                            | 1                        | 2       | 3           | 4                 | 5            | 1                           | 2        | 3           | 4                 | 5            | 1                       | 2    | 3    | 4     | 5       |
| (1) | (2)   | (4)         | (5)                        | (6)                      | (7)     | (8)         | (9)               | (10)         | (11)                        | (12)     | (13)        | (14)              | (15)         | (16)                    | (17) | (18) | (19)  | (20)    |
| 1   | Jumlah Rakor Perencanaan Tata Ruang                     |             |                            | 4 Kali                   | 10 Kali | 5 Kali      | 8 Kali            | 10 Kali      | 4 Kali                      | 10 Kali  | 5 Kali      | 8 Kali            | 11 Kali      | 100 %                   | 100% | 100% | 100 % | 100%    |
| 2   | Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata ruang              |             |                            |                          |         |             |                   | 2 Dok        |                             |          |             |                   | 2 Dok        |                         |      |      |       | 100%    |
| 3   | Aparatur Tata Ruang yang terlatih                       |             |                            | 3 Kali                   | 2 Kali  | 1 Kali      | 2 Org             | 4 Org        | 3 Kali                      | 2 Kali   | 1 Kali      | 2 org             | 3 org        | 100 %                   | 100% | 100% | 100 % | 100%    |
| 4   | Survey dan Pemetaan Perencanaan Tata Ruang              |             |                            | 1 Keg                    | 1 Paket | 1 Perangkat | 1 Dok             | 2 Album Peta |                             | 1 Paket  | 1 perangkat | 2 Dok             | 2 Album Peta | 100 %                   | 100% | 100% | 100 % | 100%    |
| 5   | Jumlah Materai  |             |                            | 800 lbr                  | 800 lbr | 850 lbr     | 850 lbr           | 850 lbr      |                             | 800 lbr  | 800 lbr     | 800 lbr           | 800 lbr      |                         | 100% | 100% | 100 % | 100%    |
| 6   | Pembayaran listrik telepon dan air                      |             |                            | 12 Bln                   | 12 Bln  | 12 Bln      | 12 Bln            | 12 Bln       |                             | 12 Bln   | 12 Bln      | 12 Bln            | 12 Bln       |                         | 100% | 100% | 100 % | 100%    |
| 7   | Jumlh alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih |             |                            |                          | 5 jenis | 5 Jenis     | 3 jenis, 16 macam | 21 jenis     |                             | 5 jenis  | 5 Jenis     | 3 jenis, 16 macam | 21 jenis     |                         | 100% | 100% | 100 % | 100%    |
| 8   | Petugas Kebersihan Kantor                               |             |                            | 2 org                    | 2 org   | 2 org       | 2 org             | 2 org        |                             | 2 org    | 2 org       | 2 org             | 2 org        |                         | 100% | 100% | 100 % | 100%    |
| 9   | Jumlah Alat Tulis Kantor                                |             |                            | 1 paket                  | 1 paket | 1 paket     | 1 Paket           | 1 paket      |                             | 22 Jenis | 22 Jenis    | 22 Jenis          | 12 bulan     |                         | 100% | 100% | 100 % | 100%    |
| 6   | Jumlah Barang Cetak/Penggandaan                         |             |                            | 1 paket                  | 1 paket | 1 paket     | 1 Paket           | 1 paket      |                             | 22 Jenis | 22 Jenis    | 22 Jenis          | 12 bulan     |                         | 100% | 100% | 100 % | 97,85 % |
| 7   | Jumlah Bahan Bacaan                                     |             |                            | 12 Bln                   | 12 Bln  | 12 Bln      | 12 Bln            | 12 Bln       |                             | 4 jenis  | 4 jenis     | 4 jenis           | 4 jenis      |                         | 100% | 100% | 100 % | 100%    |

|    |   |  |  |         |         |         |         |                     |  |              |              |              |  |  |      |      |       |         |
|----|---|--|--|---------|---------|---------|---------|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|------|------|-------|---------|
| 8  | Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai                |  |  | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 Paket | 1 paket             |  | 21.374 kotak | 21.194 kotak | 14.920 kotak | 12.722 kotak                           |  | 100% | 100% | 100 % | 82,30 % |
| 9  | Koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar Daerah   |  |  | 88 Kali | 88 Kali | 88 Kali | 99 Kali | 99 Kali             |  |              | 84 Kali      | 95 Kali      | 92 Kali                                |  | 100% | 100% | 100 % | 100%    |
| 10 | Jumlah PPT/Kontrak                                |  |  | 15 org  | 15 org  | 15 org  | 15 org  | 15 org              |  | 12 org       | 12 org       | 12 org       | 11 org                                 |  | 100% | 100% | 100 % | 100%    |
| 11 | Laptop, mesin tik, printer                        |  |  | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket             |  | 2 unit       | 2 unit       | 1 buah       | 5 buah, 3 buha, 3 buah,, 1 buah, 1 set |  | 100% | 100% | 100 % | 100%    |
| 12 | Perlengkapan Gedung Kantor                        |  |  | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket             |  | 28 Buah      | 3 buah,      | 2 buah       | 12 macam                               |  | 100% | 100% | 100 % | 100%    |
| 13 | Mebeleur  |  |  |         |         |         |         | 3 macam             |  |              |              |              | 3 macam                                |  |      |      |       | 100%    |
| 14 | Pemeliharaan Mobil Jabatan                        |  |  | 1 buah  | 1 buah  | 1 buah  | 1 buah  | 1 buah              |  | 1 buah       | 1 buah       | 1 buah       | 1 buah                                 |  | 100% | 100% | 100 % | 100%    |
| 15 | BBM Roda Dua                                      |  |  | 10 buah | 10 buah | 10 buah | 10 buah | 10 buah             |  | 10 buah      | 10 buah      | 10 buah      | 10 buah                                |  | 100% | 100% | 100 % | 100%    |
| 16 | Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional          |  |  |         |         |         | 1 buah  | 1 buah              |  |              |              | 1 buah       | 1 buah                                 |  | 100% | 100% | 100 % | 100%    |
| 17 | Perawatan AC/Tv dll                               |  |  | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket             |  | 1 paket      | 1 paket      | 1 paket      | 1 paket                                |  | 100% | 100% | 100 % | 100%    |
| 18 | Pakaian Dinas Searagam                            |  |  |         |         |         |         | 10 steel, 55 lembar |  |              |              |              | 10 steel, 55 lembar                    |  | 100% | 100% | 100 % | 100%    |
| 19 | Renja, Renstra, PK, Lakip, Lap SKPD, Lap Keuangan |  |  | 6 Dok   | 6 Dok   | 6 Dok   | 6 Dok   | 6 Dok               |  | 9 Dok        | 9 Dok        | 8 Dok        | 8 Dok                                  |  | 100% | 100% | 100 % | 100%    |
| 20 | Laporan Barang Inventaris Kantor smester I dan II |  |  | 3 Dok   | 3 Dok   | 3 Dok   | 3 Dok   | 3 Dok               |  | 2 Dok        | 2 Dok        | 2 Dok        | 2 Dok                                  |  | 100% | 100% | 100 % | 100%    |
| 21 | Buku Indikator Makro Ekonomi Kota Banjarbaru      |  |  |         |         |         |         | 75 Eks              |  |              |              |              | 75 Eks                                 |  |      |      |       | 100%    |
| 22 | Buku Pencapaian Indikator MDG's                   |  |  |         |         |         | 50 Eks  | 50 Eks              |  |              |              | 5 Eks        | 5 Eks                                  |  |      |      | 100 % | 100%    |
| 23 | Booklet   |  |  |         |         |         | 600 Eks | 539 Eks             |  |              |              | 600 Eks      | 500 Eks                                |  |      |      | 100 % | 100%    |
| 24 | Online Web  |  |  |         |         |         | 1 th    | 1 th                |  |              |              | 1 Th         | 1 Th                                   |  |      |      | 100 % | 100%    |
| 25 | Buku Best Practise                                |  |  |         |         |         | 50 Eks  | 50 Eks              |  |              |              | 50 Eks       | 0                                      |  |      |      | 100%  | 0       |

|    |   |  |  |       |        |         |         |        |       |        |         |        |        |       |      |      |       |        |
|----|---|--|--|-------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|------|------|-------|--------|
| 26 | Buku Banjarbaru Dalam Angka                           |  |  |       |        |         | 120 Eks | 50 Eks |       |        |         | 60 Eks | 50 Eks |       |      |      | 50%   | 100%   |
| 27 | Buku Statistik Kota Banjarbaru                        |  |  |       |        |         |         | 50 Eks |       |        |         |        | 50 eks |       |      |      |       | 100%   |
| 28 | Data SIPD   |  |  |       |        |         |         | 50 Eks |       |        |         |        | 50 eks |       |      |      |       | 100%   |
| 29 | Laporan Analisis SIPD                                 |  |  |       |        |         |         | 50 Eks |       |        |         |        | 50 eks |       |      |      |       | 100%   |
| 30 | Pembuatan Dok Profil Kota Banjarbaru                  |  |  |       |        |         |         | 1 Dok  |       |        |         |        | 1 Dok  |       |      |      |       | 100%   |
| 31 | Forum Konsultasi Publik                               |  |  | 1 Dok | 1 Dok  | 1 Kali  | 1 Kali  | 1 Kali | 1 Dok | 1 Dok  | 1 Kali  | 1 Kali | 1 Kali | 100 % | 100% | 100% | 100 % | 100%   |
| 32 | Forum Gab. SKPD                                       |  |  |       |        | 1 Kali  | 1 Kali  | 1 Kali |       |        | 1 Kali  | 1 Kali | 1 Kali |       |      | 100% | 100 % | 100%   |
| 33 | Pra Musrenbang kota                                   |  |  |       |        | 1 Kali  | 1 Kali  | 1 Kali |       |        | 1 Kali  | 1 Kali | 1 Kali |       |      | 100% | 100 % | 100%   |
| 34 | Musrenbang Kota                                       |  |  | 4 Keg | 1 Keg  | 1 Kali  | 1 Kali  | 1 Kali | 4 Keg | 1 Keg  | 1 Kali  | 1 Kali | 1 Kali | 100 % | 100% | 100% | 100 % | 100%   |
| 35 | Perwali RKPD  |  |  | 1 Dok | 1 Dok  | 1 Dok   | 1 Dok   | 1 Dok  | 1 Dok | 1 Dok  | 1 Dok   | 1 Dok  | 1 Dok  | 100 % | 100% | 100% | 100 % | 100%   |
| 36 | Dok. Background Study RPJMD                           |  |  |       |        |         | 1 Dok   |        |       |        |         | 1 Dok  |        |       |      |      | 100%  |        |
| 37 | Dok KLHS  |  |  |       |        |         |         | 1 Dok  |       |        |         |        | 1 Dok  |       |      |      |       | 100%   |
| 38 | Rakor Pengendalian&Penguasaan perencanaan pembangunan |  |  |       | 4 kali | 4 kali  | 4 kali  | 4 kali |       | 4 kali | 4 kali  | 4 kali | 4 kali |       | 100% | 100% | 100 % | 100%   |
| 39 | Dokumen evaluasi rencana pembangunan Kota Banjarbaru  |  |  |       |        | 1 Eks   | 1 Dok   | 1 Dok  |       |        | 1 Eks   | 1 Dok  | 1 Dok  |       |      | 100% | 100 % | 100%   |
| 40 | Dokumen Evaluasi RPJMD                                |  |  |       |        |         | 1 Dok   | 1 Dok  |       |        |         | 1 Dok  | 0      |       |      |      | 100 % | 100%   |
| 41 | KUA/PPAS Perubahan Th 2015                            |  |  | 1 Dok | 1 Dok  | 1 Dok   | 1 Dok   | 1 Dok  | 1 Dok | 1 Dok  | 1 Dok   | 1 Dok  | 1 Dok  | 100 % | 100% | 100% | 100 % | 100%   |
| 42 | KUA/PPAS Tahun 2016                                   |  |  | 1 Dok | 1 Dok  | 1 Dok   | 1 Dok   | 1 Dok  | 1 Dok | 1 Dok  | 1 Dok   | 1 Dok  | 1 Dok  | 100 % | 100% | 100% | 100 % | 100%   |
| 43 | Rakor Bidang Ekonomi                                  |  |  | 1 Keg | 1 Keg  | 10 kali | 5 Kali  | 5 Kali | 1 Keg | 1 Keg  | 10 kali | 5 Kali | 5 Kali | 100 % | 100% | 100% | 100 % | 100%   |
| 44 | Perjadin koordinasi Perenc. Ekonomi Dalam Daerah      |  |  |       |        | 20 Kali |         | 150 OK |       |        | 20 Kali |        | 14 org |       |      | 100% |       | 9,33%  |
| 45 | Perjadin koordinasi Perencanaan Ekonomi Luar Provinsi |  |  |       |        | 2 OK    | 86 OK   | 57 OK  |       |        | 2 OK    | 86 OK  |        |       |      | 100% | 100 % | 64,91% |

|    |  |  |  |         |        |          |          |          |         |       |          |          |          |       |      |      |       |      |
|----|--|--|--|---------|--------|----------|----------|----------|---------|-------|----------|----------|----------|-------|------|------|-------|------|
| 46 | Laporan Monev pembangunan bidang ekonomi           |  |  | 25 Eks  | 1 Dok  | 1 Dok    |          | 40 Buku  | 25 Eks  | 1 Dok | 1 Dok    | 40 Buku  |          | 100 % | 100% | 100% |       | 100% |
| 47 | Buku Analisis Kondisi Sosial Ekonomi               |  |  | 25 Eks  | 1 Dok  | 1 Dok    |          | 40 Buku  | 25 Eks  | 1 Dok | 1 Dok    | 40 Buku  |          | 100 % | 100% | 100% |       | 100% |
| 48 | Buku Profil Ekonomi Kota Banjarbaru Th 2015        |  |  | 25 Eks  | 1 Dok  | 1 Dok    | 40 Eks   | 40 Buku  | 25 Eks  | 1 Dok | 1 Dok    | 40 Buku  | 40 Buku  | 100 % | 100% | 100% | 100%  | 100% |
| 49 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosbud   |  |  |         | 1 Keg  |          | 12 Bulan | 12 Bulan |         | 1 Keg |          | 12 Bulan | 12 bulan |       |      |      | 85%   | 100% |
| 50 | Laporan monev mbangunan Sosial Budaya              |  |  | 1 Keg   | 1 Dok  | 4 Kali   | 2 Kali   | 5 Buku   | 1 Keg   | 1 Dok | 4 Kali   | 2 Kali   | 5 Buku   | 100 % | 100% | 100% | 100 % | 100% |
| 51 | Rapat Monev Sosbud                                 |  |  |         |        |          | 2 Kali   | 2 Kali   |         |       |          | 2 Kali   | 2 Kali   |       |      |      | 85%   | 100% |
| 52 | Buku Profil dan Analisis Gender Kota Banjarbaru    |  |  |         | 1 Dok  | 20 Eks   | 20 Eks   | 2 Dok    |         | 1 Dok | 20 Eks   | 20 Eks   | 2 Dok    |       |      | 100% | 100%  | 100% |
| 53 | Buku Profil Pemetaan Sosial Budaya Kota Banjarbaru |  |  |         | 1 Dok  | 10 Eks   | 10 Eks   | 1 Dok    |         | 1 Dok | 10 Eks   | 10 Eks   | 1 Dok    |       |      | 100% | 100%  | 100% |
| 54 | Buku Profil Kemiskinan                             |  |  | 1 Keg   |        |          | 1 Eks    | 1 Dok    | 1 Keg   |       |          | 10 Eks   | 1 Dok    | 100%  |      |      | 100 % | 100% |
| 55 | Sistem Infromasi Bidang Sosial Budaya              |  |  |         |        |          |          | 1 Paket  |         |       |          |          | 1 Paket  |       |      |      |       | 100% |
| 56 | Koordinasi PNPM Mandiri Perkotaaan                 |  |  | 1 Keg   | 1 Keg  | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 1 Keg   | 1 Keg | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100%  | 100% | 100% | 90%   | 100% |
| 57 | Koordinasi TPKD Kota Banjarbaru                    |  |  |         | 1 Keg  | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan |         | 1 Keg | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan |       |      | 100% | 90%   | 100% |
| 58 | Koordinasi PLPBK                                   |  |  |         | 1 Keg  |          | 12 bulan | 12 Bulan |         | 1 Keg |          | 12 bulan | 12 bulan |       |      | 100% | 90%   | 100% |
| 59 | Terlaksananya Monev Perencanaan Wilayah dan SDA    |  |  | 10 Buku | 1 Dok  | 1 Keg    | 3 Kali   | 100%     | 10 Buku | 1 Dok | 1 Keg    | 3 Kali   | 100%     | 100 % | 100% | 100% | 100 % | 100% |
| 60 | Laporan Monev Prasarana Wilayah                    |  |  |         |        |          |          | 15 Buku  |         |       |          |          | 15 Buku  |       |      |      |       | 100% |
| 61 | Rapat koordinasi Prasarana Wilayah dan SDA         |  |  | 4 Kali  | 4 Kali | 4 Kali   | 4 Kali   | 4 Kali   | 4 Kali  |       |          | 2 Kali   | 100%     | 100 % |      |      | 100 % | 100% |
| 62 | Tersedianya Review Dokumen                         |  |  |         |        |          | 1 Dok    | 100%     |         |       |          | 1 Dok    | 100%     |       |      |      | 100%  | 100% |



|    |  |  |  |          |         |        |        |         |          |         |        |        |         |       |      |      |       |      |
|----|--|--|--|----------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|--------|--------|---------|-------|------|------|-------|------|
|    | Masterplan Drainase Kota Banjarbaru                              |  |  |          |         |        |        |         |          |         |        |        |         |       |      |      |       |      |
| 63 | Dokumen Pembangunan Wilayah Terpadu                              |  |  |          |         |        |        | 100%    |          |         |        |        | 100%    |       |      |      |       | 100% |
| 64 | Dok Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)       |  |  |          |         |        |        | 100%    |          |         |        |        | 100%    |       |      |      |       | 100% |
| 65 | Tersedianya Review Profil dan Pemetaan Kawasan Kumuh             |  |  |          |         |        |        | 100%    |          |         |        |        |         |       |      |      |       |      |
| 66 | Terlaksananya Diseminasi Penelitian                              |  |  | 1 Kali   | 1 Kali  | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali  | 1 Kali   | 1 Dok   |        |        | 2 Kali  | 100%  | 100% | 100% | 100 % | 100% |
| 67 | Rakornas Jarlit 2015   |  |  |          |         |        |        | 1 Kali  |          |         |        |        | 0       |       |      |      |       | 0    |
| 68 | Rakorda Jarlit Bid. Pendidikan 2015                              |  |  | 12 Bulan | 1 tahun | 1 Kali |        | 1 kali  | 12 Bulan | 1 Tahun | 1 Kali |        | 1 Kali  | 100%  |      | 100% |       | 100% |
| 69 | Rakorda Jarlit Bid. Kesehatan 2015                               |  |  |          |         |        |        | 1 Kali  |          |         |        |        | 1 kali  |       |      |      |       | 100% |
| 70 | Sosialisasi Rakornas dan Rakorda                                 |  |  |          |         |        |        | 2 Kali  |          |         |        |        | 1 Kali  |       |      |      |       | 50 % |
| 71 | Terselenggaranya Kegiatan penelitian                             |  |  | 4 Judul  |         |        |        | 2 Judul | 4 Judul  |         |        |        | 2 Judul | 100%  |      |      |       | 100% |
| 72 | Penguatan Sistem Inovasi Daerah Banjarbaru                       |  |  |          |         |        |        | 1 Dok   |          |         |        | 1 Dok  |         |       |      |      |       | 100% |
| 73 | Kajian dan Strategi Penanganan Limbah Tahu Kota Banjarbaru       |  |  |          |         |        |        | 1 Dok   |          |         |        | 1 Dok  |         |       |      |      |       | 100% |
| 74 | Terlaksananya daerah anatr Daerah City Net di Indonesia dan Asia |  |  |          |         |        | 4 Kali | 4 Kali  |          |         |        | 4 Kali | 3 Kali  |       |      | 100% | 100 % | 100% |
| 75 | Diklat Nonformal Aparatur Bappeda                                |  |  | 4 Org    | 4 Org   | 4 Org  | 4 Org  | 4 Org   |          | 10 Org  | 10 Org | 37 Org | 42 Org  |       |      | 100% | 100 % | 100% |
| 76 | Peserta Bimtek Peningkatan Aparatur Perencanaan                  |  |  | 40 org   | 40 Org  | 40 Org | 40 Org | 40 Org  | 40 Org   | 40 Org  | 40 Org | 40 Org | 40 Org  | 100 % | 100% | 100% | 100 % | 100% |

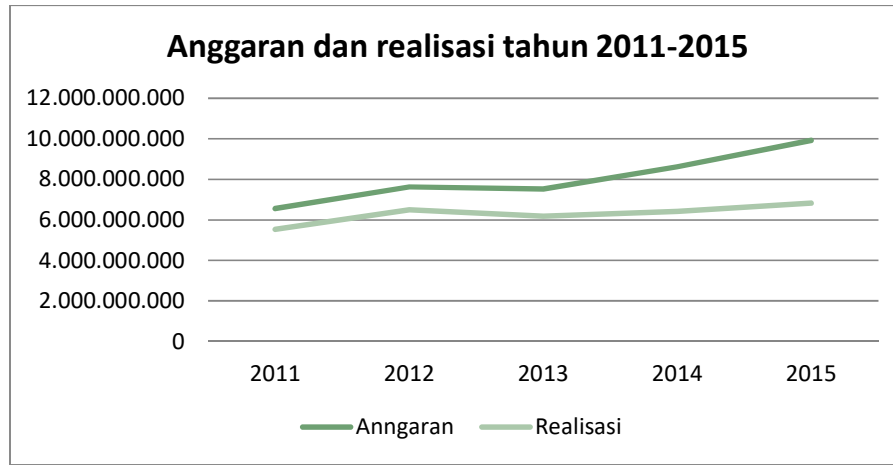
Tabel 2.6  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota  
Banjarbaru Tahun 2011-2015

| No  | Bappeda Kota Banjarbaru | Anggaran Pada Tahun ke-<br>(Rp) |               |               |               |               | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-<br>(Rp) |               |               |               |               |
|-----|-------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                         | 1                               | 2             | 3             | 4             | 5             | 1   | 2             | 3             | 4             | 5             |
| (1) | (2)                     | (3)                             | (4)           | (5)           | (6)           | (7)           | (8)                                       | (9)           | (10)          | (11)          | (12)          |
| I   | BELANJA                 |                                 |               |               |               |               |   |               |               |               |               |
| 1   | BELANJA TIDAK LANGSUNG  |                                 |               |               |               |               |   |               |               |               |               |
|     | Belanja Pegawai         | 2.027.577.160                   | 2.346.686.808 | 2.451.057.060 | 2.578.406.550 | 2.887.214.360 | 1.998.438.327                             | 2.322.945.142 | 2.435.182.139 | 2.490.297.090 | 2.521.599.132 |
| 2   | BELANJA LANGSUNG        |                                 |               |               |               |               |   |               |               |               |               |
|     | Belanja Pegawai         | 721.870.500                     | 440.681.000   | 835.840.000   | 474.665.500   | 495.362.500   | 581.471.000                               | 263.162.500   | 728.862.500   | 325.948.000   | 361.680.000   |
|     | Belanja Barang dan Jasa | 3.724.977.870                   | 4.598.768.150 | 3.714.808.110 | 5.138.116.970 | 6.211.981.800 | 2.918.837.431                             | 3.682.824.950 | 2.674.344.157 | 3.197.277.319 | 3.772.856.206 |
|     | Belanja Modal           | 84.960.000                      | 236.934.000   | 520.260.000   | 436.175.000   | 335.525.000   | 35.812.000                                | 232.974.000   | 351.312.560   | 409.752.840   | 171.307.666   |

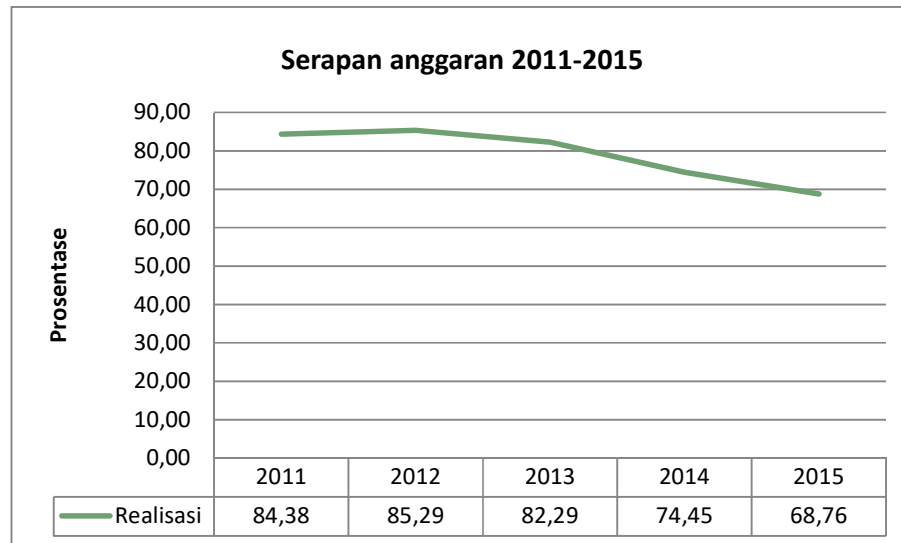
| No  | Bappeda Kota Banjarbaru | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran<br>Pada Tahun ke-<br>(Rp) |     |     |     |     | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |     |     |     |      |           |      |      |      |      |
|-----|-------------------------|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|-----|------|-----------|------|------|------|------|
|     |                         |   |     |     |     |     | Anggaran                  |     |     |     |      | Realisasi |      |      |      |      |
|     |                         | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 1                         | 2   | 3   | 4   | 5    | 1         | 2    | 3    | 4    | 5    |
| (1) | (2)                     | (1)   | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)                       | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)      | (12) | (13) | (14) | (15) |
| I   | BELANJA                 |   |     |     |     |     |                           |     |     |     |      |           |      |      |      |      |
| 1   | BELANJA TIDAK LANGSUNG  |   |     |     |     |     |                           |     |     |     |      |           |      |      |      |      |
|     | Belanja Pegawai         | 99  | 99  | 99  | 97  | 87  | 16                        | 4   | 5   | 12  |      | 16        | 5    | 2    | 1    |      |
| 2   | BELANJA LANGSUNG        |   |     |     |     |     |                           |     |     |     |      |           |      |      |      |      |
|     | Belanja Pegawai         | 81  | 60  | 87  | 69  | 73  | 39                        | 90  | 43  | 4   |      | 55        | 177  | 55   | 11   |      |
|     | Belanja Barang dan Jasa | 78  | 80  | 72  | 62  | 61  | 23                        | 19  | 38  | 21  |      | 26        | 27   | 20   | 18   |      |
|     | Belanja Modal           | 42  | 98  | 68  | 94  | 51  | 179                       | 120 | 16  | 23  |      | 551       | 51   | 17   | 58   |      |

Berdasarkan besar anggaran selama lima tahun anggaran 2011-2015 pertumbuhan anggaran Bappeda Kota Banjarbaru selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun 2013 yang ada sedikit penurunan. Dari segi besaran anggaran yang terserap juga mengalami peningkatan kecuali tahun 2013 yang mengalami sedikit penurunan. Sedangkan prosentase serapan anggaran terhadap besaran anggaran dari tahun 2011 sampai tahun 2015 cenderung menurun dari 84,38 % pada tahun 2011 sampai 68,76 % pada tahun 2015. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Grafik Anggaran, Realisasi Anggaran  
Tahun 2011-2015



Gambar 2.3. Grafik Prosentase Realisasi Serapan Anggaran  
Terhadap Pagu Tahun 2011-2015



Berdasarkan grafik diatas prosentase serapan anggaran Bappeda mengalami penurunan pada tahun 2014 dan tahun 2015. Penurunan tersebut disebabkan adanya efisiensi perjalanan dinas pada semua bidang di Bappeda Kota Banjarbaru, dimana pemerintah Kota melalui Tim Anggaran telah melakukan pengurangan anggaran pada perjalanan dinas dan anggaran digeser pada kegiatan prioritas yang lebih penting. Sedangkan pada bidang fisik prasarana juga terjadi penurunan serapan anggaran, dikarenakan adanya penetapan pagu yang terlalu rendah untuk penawaran lelang (gagal lelang), sehingga tidak ada penawaran.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **Tantangan**

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
2. Rendahnya kualitas dokumen perencanaan OPD;
3. Belum beragamnya sumber data yang digunakan dalam membuat dokumen perencanaan;
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

### **Peluang**

1. Sarana dan prasarana kerja yang memadai
2. Tersedianya dukungan anggaran
3. Sudah tersedianya sistem informasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
4. Sudah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Komitmen pemerintah pusat dalam penguatan fungsi perencanaan melalui punishment atas keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan.



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar;
4. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;

Dalam melaksanakan tugasnya dalam perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 - 2021 dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Banjarbaru didasarkan pada berbagai macam isu strategis/permasalahan yang berkembang baik dari lingkungan internal maupun eksternal Bappeda Kota Banjarbaru, yang tentunya berhubungan dengan tugas dan fungsi Bappeda. Isu strategis ini sangat perlu untuk mendapat perhatian karena akan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD. Apabila isu strategis tidak diantisipasi, akan dapat menimbulkan kerugian atau hambatan bagi kinerja Bappeda, dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan Bappeda. Namun sebaliknya apabila isu strategis diantisipasi, maka Bappeda dapat menekan faktor penghambat dan memanfaatkan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bappeda.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, maka kedudukan Renstra SKPD sebagai mana disajikan dalam Gambar 3.1. berikut :

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarbaru telah memiliki arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama masa kepemimpinannya. Arah pembangunan yang terwujud dalam visi, misi, dan program yang dijabarkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2016-2021.

Bappeda sebagai salah satu Satuan Kerja Pelaksana Daerah memiliki kewajiban untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan sesuai arah pembangunan tersebut. Untuk itu, Bappeda menelaah berbagai faktor yang menghambat dan mendukung kinerja Bappeda terhadap visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 maka visi dan Misi BAPPEDA Kota Banjarbaru tidak lepas dari Visi dan Misi Kota Banjarbaru.



Adapun Visi, Misi Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

#### **“TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER”**

**KOTA PELAYANAN** adalah Kota yang memberikan pelayanan secara optimal kepada warga masyarakat dan yang berkunjung di Kota Banjarbaru.

**BERKARAKTER** Terdiri Atas Dua Aspek Penting Yaitu:

1. Sumber daya manusia yang berkarakter, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang sehat, mempunyai etos kerja tinggi dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai religius.
2. Kota yang berkarakter, yaitu sebuah kota yang mempunyai ciri khas sebagai kota yang tertata/direncanakan (*urban design*) sehingga menjadi tempat hunian yang indah, aman dan nyaman yang berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, maka Misi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kota Banjarbaru ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarbaru, maka dapat ditelaah dari Misi ke 4 (empat) dari RPJMD Kota Banjarbaru. Hasil identifikasi faktor penghambat dan pendukung kinerja Bappeda terhadap visi, misi, dan program menjadi salah satu elemen dalam isu-isu strategis pelayanan Bappeda. Sehingga isu strategis Bappeda tidak hanya tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan Bappeda, tetapi juga berdasarkan pengelolaan terhadap faktor penghambat dan pendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru. Identifikasi faktor penghambat dan pendukung disajikan dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| Visi : Terwujudnya Kota Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter |  |                                |  |   |
|--|--|--------------------------------|--|---|
| No.  | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih  | Permasalahan Pelayanan Bappeda | Faktor   |   |
|  |  |                                | Penghambat   | Pendorong   |
| 1  | 2  | 3                              | 4  | 5   |
| 1  | <p>Misi 4</p> <p>Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.</p> |                                |  |   |
|  | <p>1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan</p>                | <p>Urusan Semua SKPD</p>       | <p>1. Kurangnya evaluasi terhadap capaian kinerja Bappeda.</p> | <p>- Mengembangkan sistem informasi data dan informasi capaian kinerja tingkat kota</p> |

|  |   |                                       |  |   |
|--|---|---------------------------------------|--|---|
|  | <p>3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan</p> <p>4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</p> <p>6. Program Perencanaan Sosial dan Budaya</p> <p>7. Program Pengembangan dan Penelitian</p> <p>8. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</p> | <p>Urusan Perencanaan Pembangunan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pemanfaatan dokumen perencanaan maupun hasil kajian untuk pengambilan kebijakan</li> <li>- Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan yang dibuat dengan hasil pengembangan dan penelitian maupun kajian teknis tertentu.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Makin perlunya kebutuhan perencanaan dan implementasi pembangunan yang komprehensif dan saling terintegrasi.</li> <li>- Dukungan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan tugas koordinasi dengan SKPD lain.</li> <li>- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perencanaan bagi sumber daya aparatur perencana di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.</li> </ul> |
|--|---|---------------------------------------|--|---|



### 3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeprov

Sebagai koordinator perencanaan di daerah tentunya Bappeda mempunyai berbagai permasalahan, permasalahan pelayanan Bappeda juga dapat digali dari keterkaitan dengan sasaran jangka menengah Renstra Bappenas seperti telah diuraikan sebelumnya. Yang dimaksud permasalahan pelayanan adalah adanya kesenjangan capaian renstra Bappeda periode sebelumnya dengan sasaran Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian terhadap permasalahan yang dapat diidentifikasi, juga dianalisis faktor penghambat dan pendukungnya.

Hasil identifikasi faktor penghambat dan pendukung permasalahan kinerja Bappeda terhadap sasaran jangka menengah Renstra Bappenas dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan menjadi satu elemen dalam isu strategis pelayanan Bappeda. Identifikasi, permasalahan pelayanan serta faktor penghambat dan pendukung disajikan dalam tabel 3.2 dan 3.4 berikut :

Tabel 3.2  
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Banjarbaru berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No. | Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas  | Permasalahan Pelayanan Bappeda  | Sebagai  |  |
|-----|---|---|--|--|
|     |   |   | Penghambat   | Pendorong  |
| (1) | (2)   | (3)   | (4 )   | (5)  |
| 1.  | Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya keselarasan antar perencanaan (pusat – provinsi – kabupaten/kota , RPJMD – Renstra, RPJMD – RKPD, RKPD – Renja);</li> <li>2. Belum optimalnya keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan anggaran;</li> <li>3. Manajemen sistem kelembagaan Bappeda masih belum optimal.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas dan fungsi masih belum terpahami secara maksimal.</li> <li>- Intensitas dan kuantitas koordinasi masih kurang.</li> <li>- Monitoring dan evaluasi belum berjalan secara optimal.</li> <li>- Lemahnya upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap rencana pembangunan nasional.</li> </ul> | Adanya sumber aparatur, sarana dan prasarana, serta etos kerja yang dibangun dengan semangat membawa perubahan untuk pembangunan daerah yang lebih maju dan bekarakter |

Adapun telaah terhadap Renstra Bappeda Provinsi dilakukan terhadap dokumen Renstra Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Dalam Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 dicantumkan bahwa Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan.

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategisnya adalah: “KALSEL MAPAN (MANDIRI DAN TERDEPAN) LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, BERDIKARI DAN BERDAYA SAING”.

Visi tersebut secara umum mengandung pengertian “Pembangunan Biru (*blue development*) Menuju Kedaulatan dan Kemapanan Berkelanjutan”. Visi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 ini mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik di masa datang yang selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Tabel 3.3  
Kaitan Visi Kepala Daerah Prov. KalSel dengan Tugas, Fungsi Bappeda

| No. | Kondisi 5 Tahun ke Depan  | Peran Bappeda  |
|-----|---|--|
| 1   | <b>Mandiri</b> , melalui elemen ini pemerintah ingin mewujudkan keseimbangan antara kemandirian pembangunan dengan aspek lingkungan hidup melalui perluasan kerjasama, baik dalam skala nasional maupun internasional dengan berbagai program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. | Melaksanakan koordinasi kerjasama antar daerah   |
| 2   | <b>Berkeadilan</b> , pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan masih terpusat di kota Banjarmasin, selain itu sektor pertanian masih mendominasi roda perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga perlu ditingkatkan <i>leading sector</i> lainnya agar dapat menyerap tenaga kerja dan berperan    | Membuat perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan potensi masing-masing wilayah sesuai rencana tata ruang wilayah |

| No. | Kondisi 5 Tahun ke Depan  | Peran Bappeda  |
|-----|---|--|
|     | <p>serta dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur juga perlu ditingkatkan untuk menunjang dan pemeratakan roda perekonomian.</p> <p>Pemeliharaan dan pembangunan prasarana, sarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial harus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan sosial yang maksimal untuk menunjang aktivitas masyarakat. Jika hal ini tercapai, maka akan menimbulkan <i>multiplier effect</i> yang dapat meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat</p> |  |
| 3   | <p><b>Sejahtera</b>, beberapa indikator kesejahteraan adalah laju pertumbuhan ekonomi, tingkat Inflasi terutama untuk kelompok makanan, serta daya beli masyarakat.</p>   | <p>Mengendalikan inflasi dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi melalui perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas</p> |
| 4   | <p><b>Berdaya Saing</b>, merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, Provinsi Kalimantan Selatan pada periode ketiga RPJPD ingin mengembangkan agrobisnis, dikarenakan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu lumbung padi Nasional.</p>  | <p>Mendorong agar dapat mengimplementasikan RPJMD ke dalam RKPD, Renstra PD dan Renja PD.</p>  |

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka upaya-upaya yang akan dilakukan, dituangkan dalam beberapa misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik
3. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan lokal
4. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya
5. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup**

Dari sisi lain identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda juga digali dari keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kemudian terhadap permasalahan yang dapat diidentifikasi, juga dianalisis faktor penghambat dan pendukungnya. Hasil identifikasi faktor penghambat dan pendukung permasalahan kinerja Bappeda terhadap RTRW dan KLHS menjadi satu elemen dalam isu strategis pelayanan Bappeda. Identifikasi, permasalahan pelayanan serta faktor penghambat dan pendukung disajikan dalam table 3.4. dan 3.5. berikut :

Tabel 3.4.  
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Banjarbaru berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sumber : Hasil Analisis Permasalahan terhadap RTRW Kota Banjarbaru

| No. | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Bappeda   | Permasalahan Pelayanan Bappeda  | Sebagai Faktor   |   |
|-----|---|---|--|---|
|     |   |   | Penghambat   | Pendorong   |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)  | (5)   |
| 1.  | <p>Perencanaan pengembangan pusat pelayanan kegiatan kota yang mencakup :</p> <p>a. Pusat kegiatan sektor perdagangan dan jasa</p> <p>b. Pusat kegiatan sektor perumahan.</p> <p>1) Perumahan pusat kota</p> <p>2) Perumahan real estate dan perumahan wisata</p> <p>3) Perumahan agropolis</p> <p>c. Pusat kegiatan sektor perkantoran.</p> <p>1) Perkantoran pemerintahan.</p> <p>2) Perkantoran swasta</p> <p>d. Pusat kegiatan sektor pariwisata.</p> <p>1) Pariwisata buatan.</p> <p>2) Pariwisata alam.</p> <p>3) Pariwisata budaya..</p> <p>e. Pusat kegiatan sektor industri.</p> <p>1) Industri rumah tangga/kecil.</p> <p>2) Industri ringan.</p> <p>f. Pusat sentra produksi pertanian</p> | <p>a. Belum optimalnya mekanisme perencanaan pembangunan Bappeda dengan SKPD dan antar SKPD sehingga intensitas koordinasi masih kurang .</p> <p>b. Penurunan daya dukung lingkungan yaitu menurunkan sumber daya air, tanah, dan udara akibat alih fungsi lahan.</p> | <p>a. Lemahnya upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan.</p> <p>b. Keterbatasan sumber daya perencanaan yang berkualitas.</p> <p>c. Pertambahan jumlah penduduk yang semakin padat.</p> <p>d. Regulasi rencana pengembangan industri belum terkoordinir dengan baik.</p> | Adanya anggaran untuk perencanaan pengembangan pusat pelayanan kota dan sumber daya yang memadai. |



|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 2. | <p>Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota</p> <p><i>Sistem Prasarana Utama</i></p> <p>a. Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem jaringan jalan</li> <li>- Transportasi Jalan</li> <li>- Sistem Jaringan Angkutan Umum</li> </ul> <p>b. Transportasi Udara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang udara diatas bandara,</li> <li>- Ruang Udara</li> <li>- Bandar Udara</li> </ul> | <p>a. Perencanaan pembangunann yang Belum optimal karena adanya alih fungsi lahan RTH.</p> <p>b. Penurunan daya dukung lingkungan hidup karena adanya penurunan daerah resapan air untuk pengembangan rencana jaringan transportasi.</p> | <p>a. Keterbatasan sumber daya perencanaan yang berkualitas (SDM aparatur yang berkompeten).</p> <p>b. Tuntutan publik akan fasilitas umum yang lebih baik lagi.</p> | Adanya Penyediaan infrastruktur daerah yang memadai. |
| 3. | <p>Sistem Prasarana Lainnya</p> <p>1) Jaringan energi/kelistrikan</p> <p>2) Jaringan Telekomunikasi</p> <p>3) Jaringan Sumber Daya Air Kota</p> <p>4) Infrastruktur perkotaan.</p>   |  |  |  |

Tabel 3.5.

Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Banjarbaru berdasarkan Analisis KLHS  
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No. | Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Bappeda   | Permasalahan Pelayanan Bappeda   | Sebagai Faktor   |  |
|-----|---|--|--|--|
|     |   |  | Penghambat   | Pendorong  |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)  | (5)  |
| 1.  | Adanya alih fungsi lahan karena keterbatasan lahan untuk rencana pembangunan.       | Belum optimalnya mekanisme perencanaan pembangunan Bappeda dengan SKPD dan antar SKPD sehingga intensitas koordinasi masih kurang. | Lemahnya upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap rencana pembangunan daerah. | Adanya jumlah sumber daya manusia di Bappeda dan SKPD lain yang memadai.   |
| 2.  | Perubahan daya dukung lingkungan hidup terhadap kualitas penurunan sumber daya air. | Regulasi yang belum optimal dalam rencana penetapan sebuah kawasan pemukiman, pertanian maupun industri.                           | Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi lingkungan dalam upaya mengurangi pencemaran lingkungan perairan.               | Tersedianya jaringan air minum/air bersih guna memenuhi permukiman yang belum terlayani air bersih dan menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air. |
| 3.  | Penurunan jasa ekosistem seperti penurunan luas lahan kawasan hutan lindung.        | Penerapan tata ruang yang kurang konsisten dengan perencanaan.   | Manajemen sistem kelembagaan Bappeda yang belum optimal.   | Adanya pengendalian pelaksanaan program kegiatan Bappeda.  |
| 4.  | Penurunan jasa ekosistem seperti penurunan keanekaragaman hayati.                   | Penerapan tata ruang yang kurang konsisten dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.                                       | Sistem pertanian/perkebunan yang cenderung monokultur.   | Adanya program pertanian organik dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan SKPD.   |

Sumber : Hasil Analisis Permasalahan terhadap RTRW Kota Banjarbaru.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini akan direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD melalui gambaran pelayanan Bappeda, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi, implikasi RTRW, dan implikasi KLHS. Penanganan isu strategis tetap harus sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan gambaran pelayanan Bappeda Kota Banjarbaru sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Adapun isu strategis yang akan ditangani oleh Bappeda pada periode tahun 2016-2021 adalah :

- 1) Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- 2) Mengoptimalkan keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3) Meningkatkan peran serta dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah
- 4) Meningkatkan Kualitas hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan
- 5) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Perencana.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Banjarbaru, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Banjarbaru yaitu: Terwujudnya Kota Banjarbaru sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.

Untuk menjadikan Bappeda yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di Kota Banjarbaru. Sehingga, kebijakan perencanaan yang disusun benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Selain itu, Bappeda dituntut untuk dapat mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah lainnya.

Sinergitas, konsistensi, dan kontinuitas perencanaan, serta kepekaan terhadap isu strategis dan permasalahan pembangunan menjadi dasar bagi Bappeda Kota Banjarbaru dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Dalam rangka mendukung visi Kota Banjarbaru tersebut, maka telah ditetapkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda tahun 2016-2021 yaitu **"Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Inovatif, Partisipatif dan Berkelanjutan"**. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan beberapa misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan.
2. Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan dokumen perencanaan sektoral dan kewilayahan.
4. Mewujudkan penelitian dan pengembangan yang akurat untuk mendukung kebijakan dan rencana pembangunan.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan visi dan misi Bappeda, maka dalam periode kerja 2016-2021 Bappeda Kota Banjarbaru menetapkan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yakni **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”**.

Dengan adanya tujuan tersebut maka indikator dari tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yakni **“Meningkatkan Nilai SAKIP”**.

Sasaran adalah target/hasil yang diharapkan dari suatu program, dan keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Berdasarkan visi, misi, dan tujuan Bappeda, maka dalam periode kerja 2016-2021 Bappeda Kota Banjarbaru menetapkan 5 (lima) sasaran strategis meliputi :

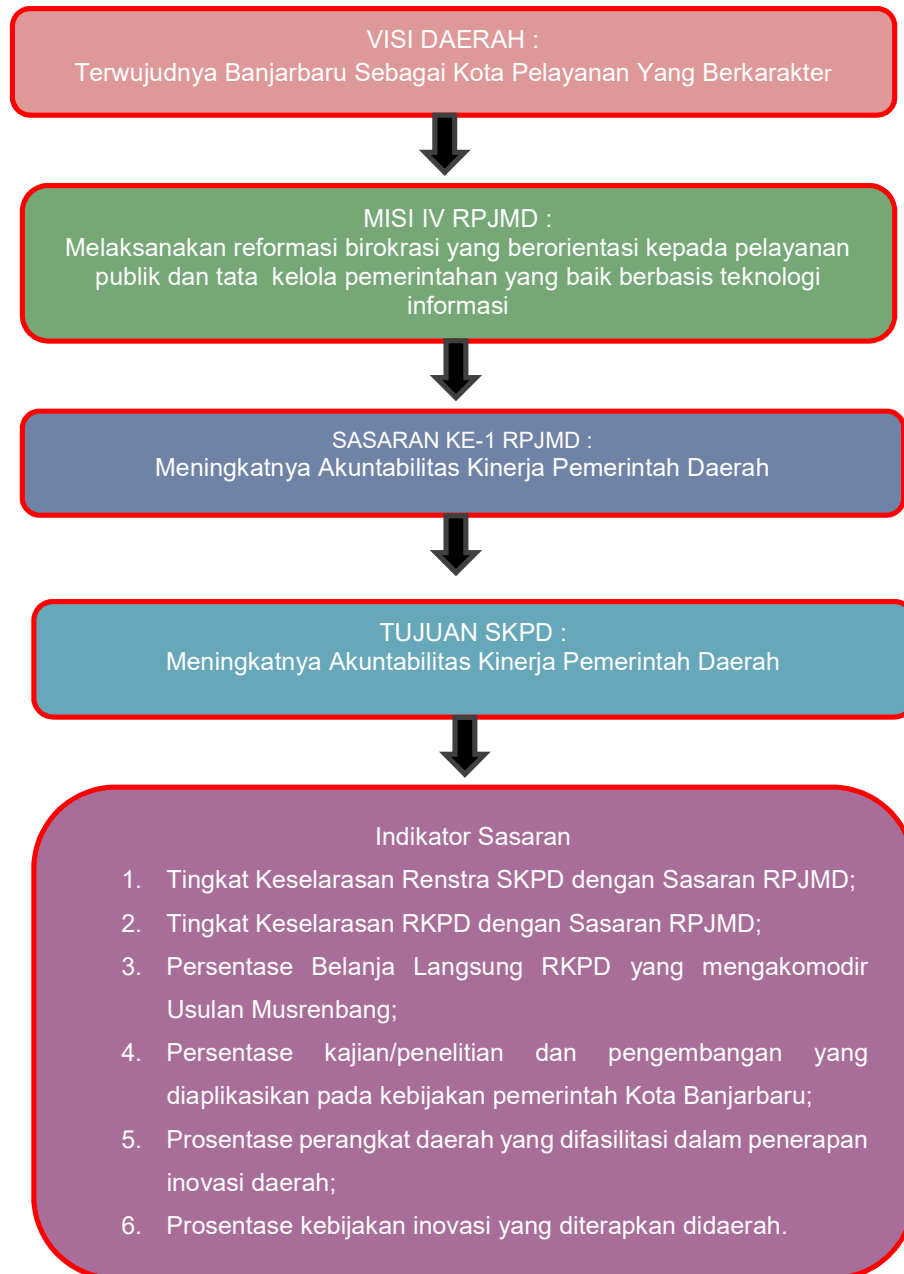
1. Mewujudkan keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
3. Meningkatnya hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan;
4. Meningkatkan Penerapan Inovasi daerah yang difasilitasi oleh perangkat daerah;
5. Meningkatkan penerapan kebijakan inovasi di daerah

Berdasarkan sasaran tersebut maka Indikator Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam penetapan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Tingkat Keselarasan Renstra SKPD dengan Sasaran RPJMD;
2. Tingkat Keselarasan RKPD dengan Sasaran RPJMD;
3. Persentase Belanja Langsung RKPD yang mengakomodir Usulan Musrenbang;
4. Persentase kajian/penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan pada kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru;
5. Prosentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah;
6. Prosentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

Keterkaitan antara RPJMD Kota Banjarbaru 2016-2021 dengan Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kota Banjarbaru ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut ini:

Gambar 4.1  
Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kota Banjarbaru



Tujuan dan sasaran tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa indikator, yang tersaji dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kota Banjarbaru

| Isu Strategis  | Tujuan   | Indikator Tujuan | Sasaran   | Indikator Sasaran  | Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke - |      |      |      |      |      |
|--|--|------------------|---|--|--|------|------|------|------|------|
|  |  |                  |   |  | 2016                                   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1)  | (2)  | (3)              | (4)   | (5)  | (6)                                    | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11) |
| 1. Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.                           | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP      | 1 Mewujudkan keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah       | Tingkat Keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD                        | 100%                                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. Mengoptimalkan keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah                 |  |                  |   | Tingkat Keselarasan RKPD dengan RPJMD                                | 100%                                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. Meningkatkan peran serta dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah |  |                  | 2 Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah | Persentase Belanja Langsung RKPD yang mengakomodir Usulan Musrenbang | 100%                                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Isu Strategis  | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran  | Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -   |      |      |      |      |      |
|--|--------|------------------|---------|--|--|------|------|------|------|------|
|  |        |                  |         |  | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1)  | (2)    | (3)              | (4)     | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11) |
| 4. Meningkatkan Kualitas hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan<br><br>5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Perencana |        |                  | 3       | Meningkatnya dokumen hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan | Persentase kajian/penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan pada kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |        |                  | 4       | Meningkatkan Penerapan Inovasi daerah yang difasilitasi oleh perangkat daerah          | Prosentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah                               | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |        |                  | 5       | Meningkatkan penerapan kebijakan inovasi di daerah                                     | Prosentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda). Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Bappeda harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran- sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Bappeda. Hal tersebut dijabarkan pada tabel 5.1 berikut ini :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

| No | Sasaran  | Indikator Sasaran  | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|----|--|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1  | Mewujudkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah                                  | 1. Tingkat keselarasan renstra SKPD dengan RPJMD<br>2. Tingkat Keselarasan RKPD dengan RPJMD | 1. Menyelenggarakan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif sesuai dengan tahapan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku<br><br>2. Peningkatan Ketersediaan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis e-government | 1. Meningkatkan konsistensi perumusan perencanaan dalam program/kegiatan pembangunan<br>2. Penyusunan kegiatan e-planning, e-budgeting dan e-monev |
| 2  | Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah                            | Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah                                  | Menyelaraskan aspirasi masyarakat kedalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang   | Meningkatkan kualitas dokumen aspirasi sesuai dengan perencanaan pembangunan   |
| 3  | Meningkatnya dokumen hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan | Meningkatnya dokumen hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan       | Menyelenggarakan kegiatan penelitian berdasarkan kebutuhan perencanaan   | Meningkatkan kualitas hasil kajian dan penelitian yang di implementasikan  |
| 4  | Meningkatkan Penerapan Inovasi daerah yang difasilitasi oleh perangkat daerah          | Prosentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah                 | Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pemerintahan  | Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui pengembangan SIDA yang penerapannya diterapkan dalam Informasi pengembangan wilayah.                 |

| No | Sasaran  | Indikator Sasaran                                      | Strategi   | Arah Kebijakan  |
|----|--|--|--|---|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5   |
| 5  | Meningkatkan penerapan kebijakan inovasi di daerah | Prosentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | Menyusun Kebijakan Daerah untuk penerapan inovasi dalam tata kelola pemerintah | Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui kebijakan untuk penerapan inovasi daerah. |

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Pada awal tahun 2017 dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) maka Program Pengembangan Data/Informasi dan Perencanaan Tata Ruang tidak lagi dilaksanakan di Bappeda. Di awal tahun 2018 untuk program Kerjasama Pembangunan, Program Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, melaksanakan program kegiatannya juga telah dilaksanakan oleh SKPD terkait lainnya. Dengan adanya penyesuaian maka Bappeda mempunyai 8 (delapan) program dan 37 kegiatan untuk perubahan renstra. Program di bappeda tersebut dikelompokkan dalam :

1. Program untuk mencapai sasaran, dan
2. Program yang sifatnya penunjang.

Program untuk mencapai sasaran terdiri dari :

1. Program Pembangunan Daerah;
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya;
4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
5. Program Pengembangan dan Penelitian.

Program yang sifatnya penunjang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Untuk selanjutnya program dan kegiatan yang direncanakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru untuk periode tahun 2016-2021, tersaji dalam tabel 6.1 berikut :

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kota Banjarbaru 2016 – 2021 yakni Melaksanakan Reformasi Birokrasi Yang Berorientasi Kepada Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Teknologi Informasi. Untuk mengukur kinerja target capaian setiap tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjarbaru di tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini :

**Tabel 7.1**  
**Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  | Satuan    | Kondisi Awal (2015) | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |      |      |      |      |      | Kondisi Akhir |
|---|-----------|---------------------|---|------|------|------|------|------|---------------|
|   |           |                     | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |               |
| <b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>  |           |                     |   |      |      |      |      |      |               |
| Tingkat keselarasan Renstra SKPD dengan sasaran RPJMD   | %         | 100                 | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100           |
| Tingkat keselarasan RKPD dengan sasaran RPJMD   | %         | 100                 | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100           |
| Persentase program pembangunan yang dapat dilaksanakan/tercapai target                                    | %         | 100                 | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100           |
| Persentase belanja langsung RKPD yang mengakomodir usulan Musrenbang                                      | %         | 100                 | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100           |
| Tersedianya dokumen perencanaan RPJD yang telah ditetapkan dengan PERDA                                   | Ada/Tidak | Ada                 | Ada   | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  | Ada           |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA                        | Ada/Tidak | Ada                 | Ada   | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  | Ada           |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA                               | Ada/Tidak | Ada                 | Ada   | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  | Ada           |
| Tersedianya dokumen RT/RW yang telah ditetapkan dengan PERDA  | Ada/Tidak | Ada                 | Ada   | -    | -    | -    | -    | -    | -             |
| Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD   | %         | 100                 | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100           |
| Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD  | %         | 100                 | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100           |
|   |           |                     |   |      |      |      |      |      |               |
| <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>  |           |                     |   |      |      |      |      |      |               |
| Persentase kajian/penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan pada kebijakan Pemerintah Kota Banjararu | %         | 100                 | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100           |
| Persentase implementasi rencana keltbangan  | %         | 50                  | 50  | 50   | 70   | 90   | 100  | 100  | 100           |
| Persentase pemanfaatan hasil keltbangan   | %         | 70                  | 70  | 70   | 80   | 90   | 100  | 100  | 100           |
| Penerapan SIDA ;  |           |                     |   |      |      |      |      |      |               |
| Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah                              | %         | 50                  | 50  | 50   | 70   | 80   | 90   | 100  | 100           |
| Presentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah  | %         | 50                  | 50  | 50   | 70   | 80   | 90   | 100  | 100           |



## BAB VIII

## PENUTUP

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparat Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Kepala Bappeda,  
  
**KANAFT, S.P., MM**  
Pembina Tk I  
NIP. 19700215 199101 1 002



**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan  
Periode Tahun 2016-2021**

| TUJUAN   | SASARAN   | PROGRAM/<br>KEGIATAN  | Indikator Kinerja Tahunan   | Periode        |  |                |                                |                |               |                  |               |                  |               |                  |               |                  |                |   |
|--|---|---|---|----------------|--|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---|
|  |   |   |   | Tahun 1 (2016) |  | Tahun 2 (2017) |                                | Tahun 3 (2018) |               | Tahun 4 (2019)   |               | Tahun 5 (2020)   |               | Tahun 6 (2021)   |               | Kondisi Akhir    |                |   |
|  |   |   |   | Target         | Rp   | Target         | Rp                             | Target         | Rp            | Target           | Rp            | Target           | Rp            | Target           | Rp            | Target           | Rp             |   |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | 1. Mewujudkan keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah                          |   | Nilai SAKIP   |                |  |                |                                |                |               |                  |               |                  |               |                  |               |                  |                |   |
|  |   |   | Presentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti                      | 100%           |  | 100%           |                                | 100%           |               | 100%             |               | 100%             |               | 100%             |               | 100%             |                |   |
|  |   |   | Nilai evaluasi LAKIP  | B              |  | B              |                                | BB             |               | BB               |               | A                |               | A                |               | A                |                |   |
|  | 3. Meningkatkan hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Indeks Kepuasan Internal  | 100%           | 702.000.000                                      | Baik (75)      | 1.546.000.000                  | Baik (78)      | 1.949.000.000 | Sangat Baik (80) | 2.046.000.000 | Sangat Baik (82) | 2.148.000.000 | Sangat Baik (83) | 2.256.000.000 | Sangat Baik (83) | 10.647.000.000 |   |
|  | 4. Meningkatkan Penerapan Inovasi daerah yang difasilitasi oleh perangkat daerah  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah materai @Rp. 3.000<br>Jumlah materai @Rp 6.000<br>Perangko @Rp 3.000 | 450 lembar     | 3.300.000  | 100 lembar     | 3.300.000                      | -              | -             | -                | -             | -                | -             | -                | -             | 550 Lembar       | 6.600.000      |   |
|  | 5. Meningkatkan penerapan kebijakan inovasi di daerah                             | Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik  | Terbayarnya rekening listrik, telepon dan air                               | 12 bulan       | 124.200.000                                      | -              | -                              | -              | -             | -                | -             | -                | -             | -                | -             | -                | -              | - |
|  |   |   | Terbayarnya rekening listrik, telepon, air dan internet                     | -              | -  | 12 bulan       | 167.158.383                    |                | -             | -                | -             | -                | -             | -                | -             | -                | -              | - |
|  |   |   | Tersedianya langganan rekening listrik, telepon , air dan internet          | -              | -  | -              | -                              | 12 bulan       | 256.830.000   | -                | -             | -                | -             | -                | -             | -                | -              | - |
|  |   |   | Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik                   | -              | -  | -              | -                              | -              | -             | 12 bulan         | 256.830.000   | 12 bulan         | 269.671.500   | 12 bulan         | 283.155.075   | 12 bulan         | 1.357.844.958  |   |
|  |   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor   | Tersedianya jasa kebersihan kantor  | 2 orang        | 14.400.000                                       | 2 orang        | 14.400.000                     | 24 ob          | 14.400.000    | 24 ob            | 14.400.000    | 24 ob            | 15.120.000    | 24 ob            | 15.876.000    | 24 ob            | 88.596.000     |   |
|  |   | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | Tersedianya alat tulis kantor   | 35 jenis       | 20.000.000                                       | 35 jenis       | 20.000.000                     | 31 Jenis       | 22.411.400    | 12 bulan         | 25.000.000    | 12 bulan         | 26.250.000    | 12 bulan         | 27.562.500    | 12 bulan         | 141.223.900    |   |
|  |   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                  | 9 jenis        | 30.000.000                                       | 9 jenis        | 30.000.000                     | 9 Jenis        | 30.427.600    | 12 bulan         | 30.500.000    | 12 bulan         | 32.025.000    | 12 bulan         | 33.626.250    | 12 bulan         | 186.578.850    |   |
|  |   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah alat listrik dan jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih          | 4 jenis        | 13.000.000                                       | 4 Jenis        | 10.500.000                     | 4 Jenis        | 9.130.000     | -                | -             | -                | -             | -                | -             | 12 Jenis         | 32.630.000     |   |
|  |   |   | Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih               | -              | -  | -              | -                              | -              | -             | 12 bulan         | 11.000.000    | 12 bulan         | 11.550.000    | 12 bulan         | 12.127.500    | 12 bulan         | 34.677.500     |   |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                          | Jumlah surat kabar  | 12 bulan  | 500.000        | 12 bulan   | 7.799.400      | -                              | -              | -             | -                | -             | -                | -             | -                | -             | -                | -              |   |
|  |   | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan   | -   | -              | -  | -              | 12 Bulan                       | 7.224.000      | 12 Bulan      | 11.352.000       | 12 Bulan      | 11.919.600       | 12 Bulan      | 12.515.580       | 12 Bulan      | 51.310.580       |                |   |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman  | Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat, dan tamu   | 13860 kotak   | 57.980.000     | 9708 oh, 200 kotak,720 kotak,720 porsi,263 kotak | 110.952.000    | 14.52 oh, 168 kotak, 116 kotak | 118.152.000    | 12 Bulan      | 122.280.000      | 12 Bulan      | 128.394.000      | 12 Bulan      | 134.813.700      | 12 Bulan      | 672.571.700      |                |   |
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah                              | Koordinasi dan konsultasi kecamatan dan kelurahan koordinasi dan konsultasi keluar daerah koordinasi dan konsultasi keluar daerah luar propinsi | 70 OK   | 237.620.000    | -  | -              | -                              | -              | -             | -                | -             | -                | -             | -                | -             | 70 OK            | 237.620.000    |   |

|  |  |                                    |                    |                                    |                    |                                    |                    |                                    |                    |                                    |                    |                                    |                    |                                    |                      |
|--|--|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
|  | Perjalanan dinas dalam daerah, Perjalanan luar daerah luar propinsi, <u>Perjalanan luar negeri</u>   | -                                  | -                  | 37 ok,1 tahun,1 ok                 | 930.430.217        | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | 37 ok,1 tahun,1 ok                 | 930.430.217          |
|  | Tersedianya iuran APEKSI/ADEKSI/ASDEKSI/AKKOPSI/CITYNET, tersedianya biaya perjalanan dinas, tersedianya kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis | -                                  | -                  | -                                  | -                  | 3 Jenis, 208 Ok, 13 Ok             | 1.231.345.000      | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | 3 Jenis, 208 Ok, 13 Ok             | 1.231.345.000        |
|  | Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah   | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | 12 Bulan                           | 1.315.558.000      | 12 Bulan                           | 1.381.035.900      | 12 Bulan                           | 1.450.687.695      | 12 Bulan                           | 4.147.281.595        |
| Penyediaan Jasa Non PNS                                  | Tersedianya jasa PTT, tersedianya jasa tenaga kontrak, tersedianya jasa jaga malam   | 36 ob                              | 201.000.000        | 36 Ob                              | 251.460.000        | 36 ob                              | 259.080.000        | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | 36 Ob                              | 711.540.000          |
|  | Tersedianya jasa Non PNS   | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | 100%                               | 259.080.000        | 100%                               | 272.034.000        | 100%                               | 285.635.700        | 100%                               | 816.749.700          |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> | Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik  | 100%                               | <b>794.000.000</b> | 100%                               | <b>841.000.000</b> | 100%                               | <b>234.000.000</b> | 100%                               | <b>246.000.000</b> | 100%                               | <b>258.000.000</b> | 100%                               | <b>271.000.000</b> | 100%                               | <b>2.644.000.000</b> |
| Pembangunan Gedung Kantor                                | Pembuatan garasi mobil dinas<br>Pembuatan tempat parkir karyawan   | 1 paket                            | 90.000.000         | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | 1 paket                            | 90.000.000           |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                     | Jenis alat penyimpanan perlengkapan kantor dan jenis alat rumah tangga lainnya   | 3 jenis                            | 110.150.000        | 3 jenis                            | 217.800.000        | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                    |
|  | Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | 3 jenis                            | 24.150.000         | 3 Jenis                            | 23.000.000         | 3 Jenis                            | 27.500.000         | 3 Jenis                            | 30.125.000         | 16 Jenis                           | 432.725.000          |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                        | Tersedianya Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik   | 4 jenis                            | 172.075.000        | 2 jenis                            | 79.600.000         | -                                  | -                  | 2 jenis                            | 30.000.000         | 2 jenis                            | 50.000.000         | 2 jenis                            | 42.744.000         | 12 jenis                           | 374.419.000          |
| Pengadaan Mebeleur                                       | Jumlah mebeleur yang diadakan  | 2 jenis                            | 50.000.000         | 2 jenis                            | 73.000.000         | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | 4 Jenis                            | 123.000.000          |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                 | Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor   | 10 jenis                           | 65.000.000         | 10 Jenis                           | 155.000.000        | 5 Jenis                            | 13.600.000         | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                    |
|  | Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | 10 Jenis                           | 30.000.000         | 10 Jenis                           | 31.500.000         | 10 Jenis                           | 33.075.000         | 55 Jenis                           | 328.175.000          |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan                 | Jumlah mobil jabatan   | 1 Buah                             | 95.889.000         | 2 buah                             | 52.370.300         | 2 Buah                             | 74.307.500         | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                    |
|  | Terpeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | 2 Buah                             | 55.000.000         | 2 Buah                             | 50.030.000         | 2 Buah                             | 52.687.500         | 11 Buah                            | 380.284.300          |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional   | Pemeliharaan kendaraan dinas operasional   | 1 Unit Mobil, 10 Unit Sepeda Motor | 135.886.000        | 1 Unit Mobil, 10 Unit Sepeda Motor | 82.015.700         | 1 Unit Mobil, 10 Unit Sepeda Motor | 95.920.100         | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                    |
|  | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | 1 Unit Mobil, 11 Unit Sepeda Motor | 83.000.000         | 1 Unit Mobil, 11 Unit Sepeda Motor | 71.220.000         | 1 Unit Mobil, 11 Unit Sepeda Motor | 81.281.000         | 6 Unit Mobil, 63 Unit Sepeda Motor | 549.322.800          |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor    | Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor  | -                                  | -                  | 2 jenis                            | 15.000.000         | 2 jenis                            | 4.600.000          | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                    |
|  | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik   | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | 4 Jenis                            | 10.000.000         | 4 Jenis                            | 10.500.000         | 4 Jenis                            | 11.025.000         | 16 Jenis                           | 51.125.000           |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor       | Terwujudnya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor   | 3 Jenis                            | 75.000.000         | 3 Jenis                            | 45.114.000         | 3 Jenis                            | 21.422.400         | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                    |
|  | Terpeliharanya Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | 3 Jenis                            | 15.000.000         | 3 Jenis                            | 17.250.000         | 3 Jenis                            | 20.062.500         | 16 Jenis                           | 193.848.900          |
| Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                  | Ruang perpustakaan<br>Ruang laktasi<br>Rehabilitasi gedung kantor  | -                                  | -                  | 1 buah, 1 buah, 1 paket            | 121.100.000        | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | -                                  | -                  | 1 buah, 1 buah, 1 paket            | 121.100.000          |

|   |  |  |                 |           |              |           |            |                     |            |                     |            |                     |            |  |                 |
|---|--|--|-----------------|-----------|--------------|-----------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--|-----------------|
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                      | Meningkatnya Kapasitas Aparatur  | 100%   | 283.185.000     | 100%      | 98.810.000   | -         | -          | -                   | -          | -                   | -          | -                   | -          | 100%   | 381.995.000     |
| Pendidikan dan Pelatihan Non Formal   | Jumlah aparat Bappeda yang mengikuti Diklat Non Formal   | 22 ok  | 283.185.000     | 22 ok     | 98.810.000   | -         | -          | -                   | -          | -                   | -          | -                   | -          | 44 ok  | 381.995.000     |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan          | Nilai Evaluasi AKIP  | -  | 75.000.000      | B         | 34.000.000   | B         | 37.000.000 | CC                  | 38.000.000 | BB                  | 40.000.000 | A                   | 42.000.000 | A  | 42.000.000      |
|   | Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti   | -  | -               | 100%      | -            | 100%      | -          | 100%                | -          | 100%                | -          | 100%                | -          | 100%   | -               |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                  | Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu   | -  | -               | 5 Dokumen | 15.250.000   | 5 Dokumen | 20.674.900 | 5 Dokumen           | 20.100.000 | 5 Dokumen           | 20.500.000 | 5 Dokumen           | 21.000.000 | 25 Dokumen   | 97.524.900      |
| Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan   | Renstra, Renja, Penetapan Kinerja, laporan keuangan, laporan SKPD, Lakip, Usulan perubahan 2016, usulan kegiatan tahun 2017                              | 6 dokumen  | 52.655.000      | 1 Dokumen | 12.583.000   | 1 Dokumen | 14.855.000 | -                   | -          | -                   | -          | -                   | -          | 8 dokumen  | 80.093.000      |
|   | 1.Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu<br>2.Persentase waktu penyelesaian surat perintah membayar yang dinyatakan lengkap dan sah secara tepat waktu | -  | -               | -         | -            | -         | -          | 1 Dokumen<br>1 Hari | 16.400.000 | 1 Dokumen<br>1 Hari | 17.000.000 | 1 Dokumen<br>1 Hari | 17.500.000 | 3 Dokumen<br>3 Hari  | 50.900.000      |
| Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang   | Laporan aset/barang semester I dan II<br>Kesesuaian BMD Bappeda dengan Neraca Aset   | 2 Dokumen  | 22.345.000      | 2 Dokumen | 6.167.000    | 2 Dokumen | 1.470.100  | -                   | -          | -                   | -          | -                   | -          | -  | -               |
|   | 1. Kesesuaian BMD Bappeda dengan neraca aset<br>2.Jumlah laporan inventaris barang tepat waktu   | -  | -               | -         | -            | -         | -          | 1 dokumen           | 1.500.000  | 1 dokumen           | 2.500.000  | 1 dokumen           | 3.500.000  | 9 dokumen  | 37.482.100      |
| Program Pengembangan Data/Informasi   | Meningkatnya Ketersediaan Data/Informasi   | 100%   | 338.095.500     | -         | -            | -         | -          | -                   | -          | -                   | -          | -                   | -          | 100%   | 338.095.500     |
| Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan | Dokumen pencapaian SPM   | 1 dokumen  | 16.513.500      | -         | -            | -         | -          | -                   | -          | -                   | -          | -                   | -          | 1 dokumen  | 16.513.500      |
| Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan      |  | 100 eks  | 173.358.000     | -         | -            | -         | -          | -                   | -          | -                   | -          | -                   | -          | 100 eks  | 173.358.000     |
| Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi                  | Buku indikator makro kota Banjarbaru tahun 2016<br>Peningkatan wawasan aparaturnya statistik   | 50 eks, 3 orang  | 66.370.000      | -         | -            | -         | -          | -                   | -          | -                   | -          | -                   | -          | 50 eks, 3 orang  | 66.370.000      |
| Penyusunan Profile Daerah   | Leaflet selang pandang kota Banjarbaru<br>booklet profil kota banjarbaru<br>updating website Bappeda   | 400 eks, 400 eks,1 tahun   | 81.854.000      | -         | -            | -         | -          | -                   | -          | -                   | -          | -                   | -          | 400 eks, 400 eks,1 tahun   | 81.854.000      |
| Program Perencanaan Tata Ruang  | Dokumen Perencanaan Tata Ruang   | 2 dokumen  | 1.598.467.900,0 | -         | -            | -         | -          | -                   | -          | -                   | -          | -                   | -          | 2 dokumen  | 1.598.467.900,0 |
| Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan  | Dokumen RDTR Kec Liang Anggang<br>Dokumen peraturan zonasi<br>Kec Landasan Ulin  | 1 dokumen  | 603.378.000,0   | -         | -            | -         | -          | -                   | -          | -                   | -          | -                   | -          | 1 dokumen  | 603.378.000,0   |
| Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang   | Rapat Koordinasi Perencanaan Tata Ruang  | 10 kali  | 116.921.950,0   | -         | -            | -         | -          | -                   | -          | -                   | -          | -                   | -          | 10 kali  | 116.921.950,0   |
| Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang   |  | 2 orang  | 34.630.000,0    | -         | -            | -         | -          | -                   | -          | -                   | -          | -                   | -          | 2 orang  | 34.630.000,0    |
| Survei dan Pemetaan untuk Perencanaan Tata Ruang  | 1 dokumen data base pemanfaatan dan penggunaan lahan keluarahan komet dan peta   | 1 dokumen dan peta databae pemanfaatan dan penggunaan lahan keluarahan komet | 843.537.950,0   | -         | -            | -         | -          | -                   | -          | -                   | -          | -                   | -          | 1 dokumen dan peta databae pemanfaatan dan penggunaan lahan keluarahan komet | 843.537.950,0   |
| Program Kerjasama Pembangunan   | Kerjasama Pembangunan Daerah   | 100%   | 819.655.450     | 100%      | 2.160.800,00 | -         | -          | -                   | -          | -                   | -          | -                   | -          | 100%   | 821.816.250,00  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|   |  |        |            |        |            |        |            |   |   |   |   |   |   |         |            |
|---|--|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---|---|---|---|---|---|---------|------------|
|   | <p>Prosentase Keselarasan Target Indikator Program RPJMD dengan Target Indikator Program Renstra Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas KP3, Dinas BP dan PTSP, Badan PPRD</p> <p>Prosentase Keselarasan Sasaran RPJMD dengan sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBANGPOL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUKKB, PMPPPA, DISPORABUDPAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat</p> <p>Prosentase Keselarasan Target Indikator Sasaran RPJMD dengan Target Indikator sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBANGPOL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUKKB, PMPPPA, DISPORABUDPAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat</p> <p>Prosentase Keselarasan Program RPJMD dengan Program Renstra Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBANGPOL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUKKB, PMPPPA, DISPORABUDPAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat</p> <p>Prosentase Keselarasan Target Indikator Program RPJMD dengan Target Indikator Program Renstra Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBANGPOL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUKKB, PMPPPA, DISPORABUDPAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat.</p> <p>Prosentase Keselarasan Sasaran RPJMD dengan sasaran RKPd Lingkup Bidang Ekonomi</p> <p>Prosentase Keselarasan Target Indikator Sasaran RPJMD dengan Target Indikator sasaran RKPd Lingkup Bidang Ekonomi</p> <p>Prosentase Keselarasan Program RPJMD dengan Program RKPd Lingkup Bidang Ekonomi</p> <p>Prosentase Keselarasan Target Indikator Program RPJMD dengan Target Indikator Program RKPd Lingkup Bidang Ekonomi</p> <p>Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam APBD pada Seluruh SKPD terkait</p> |        |            |        |            |        |            |   |   |   |   |   |   |         |            |
| Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | Rapat koordinasi perencanaan bidang ekonomi yang ada   | 8 kali | 58.199.250 | 4 kali | 10.776.000 | 5 Kali | 13.925.500 | - | - | - | - | - | - | 17 Kali | 82.900.750 |

|   |                              |   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
|---|------------------------------|---|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Jumlah SKPD Yang diasistansi untuk menselaraskan Sasaran Renstra pada Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas KP3, Dinas BP dan PTSP, Badan PPRD dengan RPJMD                  | 5 Sasaran                    | - | 5 Sasaran                    | -           | 5 Sasaran                    | -           | 5 Sasaran                    | 13.925.500  | 5 Sasaran                    | 14.621.775  | 5 Sasaran                    | 15.352.864  | 5 Sasaran                    | 43.900.139  |
| Jumlah SKPD Yang diasistansi untuk menselaraskan Target Indikator Sasaran Renstra pada Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas KP3, Dinas BP dan PTSP, Badan PPRD dengan RPJMD | 9 Indikator Sasaran          |   | 9 Indikator Sasaran          |             | 9 Indikator Sasaran          |             | 9 Indikator Sasaran          |             | 9 Indikator Sasaran          |             | 9 Indikator Sasaran          |             | 9 Indikator Sasaran          |             |
| Jumlah SKPD yang diasistansi untuk menselaraskan Program Renstra pada Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas KP3, Dinas BP dan PTSP, Badan PPRD dengan RPJMD                  | 32 Program                   |   | 32 Program                   |             | 32 Program                   |             | 32 Program                   |             | 32 Program                   |             | 32 Program                   |             | 32 Program                   |             |
| Jumlah SKPD yang diasistansi untuk menselaraskan Target Indikator Program Renstra pada Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas KP3, Dinas BP dan PTSP, Badan PPRD dengan RPJMD | 101 Target Indikator Program |   | 101 Target Indikator Program |             | 101 Target Indikator Program |             | 101 Target Indikator Program |             | 101 Target Indikator Program |             | 101 Target Indikator Program |             | 101 Target Indikator Program |             |
| Jumlah SKPD yang diasistansi untuk menselaraskan Sasaran RKPD pada Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas KP3, Dinas BP dan PTSP, Badan PPRD dengan RPJMD                     | 5 Sasaran                    |   | 5 Sasaran                    |             | 5 Sasaran                    |             | 5 Sasaran                    |             | 5 Sasaran                    |             | 5 Sasaran                    |             | 5 Sasaran                    |             |
| Jumlah SKPD yang diasistansi untuk meselaraskan Target Indikator Sasaran RKPD Pada Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas KP3, Dinas BP dan PTSP, Badan PPRD dengan RPJMD     | 9 Indikator Sasaran          |   | 9 Indikator Sasaran          |             | 9 Indikator Sasaran          |             | 9 Indikator Sasaran          |             | 9 Indikator Sasaran          |             | 9 Indikator Sasaran          |             | 9 Indikator Sasaran          |             |
| Jumlah SKPD yang diasistansi untuk meselaraskan Program pada RKPD Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas KP3, Dinas BP dan PTSP, Badan PPRD dengan RPJMD                      | 32 Program                   |   | 32 Program                   |             | 32 Program                   |             | 32 Program                   |             | 32 Program                   |             | 32 Program                   |             | 32 Program                   |             |
| Jumlah SKPD yang diasistansi untuk meselaraskan Target Indikator Program pada RKPD Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Naker, Dinas KP3, Dinas BP dan PTSP, Badan PPRD dengan RPJMD     | 101 Target Indikator Program |   | 101 Target Indikator Program |             | 101 Target Indikator Program |             | 101 Target Indikator Program |             | 101 Target Indikator Program |             | 101 Target Indikator Program |             | 101 Target Indikator Program |             |
| Jumlah SKPD bidang ekonomi yang kegiatannya termonitor dan dievaluasi melalui rapat monev dan peninjauan lapangan   | 5 SKPD                       |   | 5 SKPD                       |             | 5 SKPD                       |             | 5 SKPD                       |             | 5 SKPD                       |             | 5 SKPD                       |             | 5 SKPD                       |             |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah   | -                            | - | 3 dokumen                    | 223.474.000 | 3 dokumen                    | 156.074.500 | -                            | -           | -                            | -           | -                            | -           | 6 dokumen                    | 379.548.500 |
| Kajian analisis potensi ekonomi Profil ekonomi kota Banjarbaru tahun 2017<br>Kajian analisis kinerja usaha mikro, kecil dan menengah<br>Kajian analisis kondisi social ekonomi kota Banjarbaru  |                              |   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |
| Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang tersusun   | 3 Dokumen                    | - | 6 Dokumen                    | -           | 9 Dokumen                    | -           | 13 Dokumen                   | 165.074.500 | 16 Dokumen                   | 173.378.225 | 19 Dokumen                   | 181.647.136 | 19 Dokumen                   | 520.099.861 |



|                                       |   |           |             |           |             |      |             |      |             |      |             |      |             |           |             |
|---------------------------------------|---|-----------|-------------|-----------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|
| Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan   | Dokumen money<br>Rapat money  | 1 dokumen | 6.492.050   | 1 dokumen | 6.750.000   | -    | -           | -    | -           | -    | -           | -    | -           | 2 dokumen | 13.242.050  |
| Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah   | Kajian perekonomian kota<br>Banjarbaru<br>Profil ekonomi kota Banjarbaru tahun<br>2016<br>Rencana induk pembangunan<br>industry daerah  | 1 dokumen | 255.308.700 | -         | -           | -    | -           | -    | -           | -    | -           | -    | -           | 1 dokumen | 255.308.700 |
| Program Perencanaan Sosial dan Budaya | <p>Prosentase Keselarasan Sasaran<br/>RPJMD dengan sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBANGPOL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUKKB, PMPPPA, DISPORABUDPAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat</p> <p>Prosentase Keselarasan Target Indikator Sasaran RPJMD dengan Target Indikator sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBANGPOL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUKKB, PMPPPA, DISPORABUDPAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat</p> <p>Prosentase Keselarasan Program RPJMD dengan Program Renstra Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBANGPOL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUKKB, PMPPPA, DISPORABUDPAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat</p> <p>Prosentase Keselarasan Target Indikator Program RPJMD dengan Target Indikator Program Renstra Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBANGPOL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUKKB, PMPPPA, DISPORABUDPAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat.</p> <p>Prosentase Keselarasan Sasaran RPJMD dengan sasaran RKPd Lingkup Bidang Sosial Budaya</p> <p>Prosentase Keselarasan Target Indikator Sasaran RPJMD dengan Target Indikator sasaran RKPd Lingkup Bidang Sosial Budaya</p> <p>Prosentase Keselarasan Program RPJMD dengan Program RKPd Lingkup Bid. Sosial Budaya</p> <p>Prosentase Keselarasan Target Indikator Program RPJMD dengan Target Indikator Program RKPd Lingkup Bidang Sosial Budaya</p> <p>Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam APBD pada Seluruh SKPD terkait</p> | 100%      | 480.000.000 | 100%      | 472.000.000 | 100% | 392.000.000 | 100% | 411.000.000 | 100% | 432.000.000 | 100% | 453.000.000 | 100%      | 453.000.000 |

[illegible]

|  |   |                              |               |                              |               |                              |               |                              |             |                              |             |                              |             |             |             |
|--|---|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | Jumlah SKPD Yang diasistansi untuk menselaraskan Program pada RKPD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBANGPOL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUKKB, PMPPPA, DISPORABUDPAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat dengan RPJMD                  | 115 Program                  |               | 115 Program                  |               | 115 Program                  |               | 115 Program                  |             | 115 Program                  |             | 115 Program                  |             | 252 Program |             |
|  | Jumlah SKPD Yang diasistansi untuk menselaraskan Target Indikator Program pada RKPD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBANGPOL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUKKB, PMPPPA, DISPORABUDPAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat dengan RPJMD | 206 Target Indikator Program |               | 206 Target Indikator Program |               | 206 Target Indikator Program |               | 206 Target Indikator Program |             | 206 Target Indikator Program |             | 206 Target Indikator Program |             |             |             |
|  | Jumlah SKPD bidang sosial budaya yang kegiatannya termonitor dan dievaluasi melalui rapat monev dan peninjauan lapangan   | 16 SKPD                      |               | 16 SKPD                      |               | 16 SKPD                      |               | 16 SKPD                      |             | 16 SKPD                      |             | 16 SKPD                      |             | 16 SKPD     |             |
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                           | Laporan monev pembangunan bidang sosial dan budaya  | 1 dokumen                    | 12.450.000    | 1 dokumen                    | 12.450.000    | -                            | -             | -                            | -           | -                            | -           | -                            | -           | 2 dokumen   | 24.900.000  |
| Analisis Pembangunan Sosial Daerah                           | Dokumen penyusunan analisis IPM Kota Banjarbaru<br>Analisis bidang pendidikan kota Banjarbaru<br>Analisis bidang kesehatan kota Banjarbaru  | 1 dokumen                    | 124.985.000   | -                            | -             | -                            | -             | -                            | -           | -                            | -           | -                            | -           | 1 dokumen   | 124.985.000 |
| Pembinaan Program Kemiskinan                                 | Rapat koordinasi TKPK<br>Rapat koordinasi KOTAKU<br>Pelatihan peningkatan kapasitas pelaksana program kemiskinan<br>Rapat pendataan kemiskinan  | 12 Bulan                     | 222.264.000   | 12 Bulan                     | 242.215.000   | 12 Bulan                     | 34.500.000    | -                            | -           | -                            | -           | -                            | -           | 12 Bulan    | 498.979.000 |
|  | Jumlah SKPD yang dikoordinasi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan   | 16 SKPD                      |               | 16 SKPD                      |               | 16 SKPD                      |               | 16 SKPD                      | 34.500.000  | 16 SKPD                      | 45.959.600  | 16 SKPD                      | 46.036.250  | 16 SKPD     | 126.495.850 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya | Dokumen penyusunan bidang Sosial dan Budaya<br>Penyusunan perencanaan spasial bid pendidikan dan kesehatan  | -                            | -             | 3 dokumen                    | 173.715.000   | 1 Dokumen                    | 273.453.000   | -                            | -           | -                            | -           | -                            | -           | 4 dokumen   | 447.168.000 |
|  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang tersusun   | 5 Dokumen                    | -             | 10 Dokumen                   | -             | 15 Dokumen                   | -             | 20 Dokumen                   | 283.629.000 | 25 Dokumen                   | 287.310.450 | 30 Dokumen                   | 304.301.932 | 30 Dokumen  | 875.241.382 |
| Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat                   | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kota sehat   | -                            | -             | -                            | -             | 12 Bulan                     | 53.626.000    | -                            | -           | -                            | -           | -                            | -           | 12 Bulan    | 53.626.000  |
|  | Jumlah SKPD dan Stakeholder terkait yang dikoordinasi dalam pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Kota Sehat   | 16 SKPD                      |               | 16 SKPD                      |               | 16 SKPD                      |               | 16 SKPD                      | 53626000    | 16 SKPD                      | 56307300    | 16 SKPD                      | 59122665    | 16 SKPD     | 169.055.965 |
| Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam   | Prosentase Keselarasan Sasaran RPJMD dengan sasaran Renstra Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan  | 100%                         | 2.821.000.000 | 100%                         | 2.491.000.000 | 100%                         | 2.651.000.000 | 100%                         | #REF!       | 100%                         | #REF!       | 100%                         | #REF!       | 100%        | #REF!       |

|   |   |           |               |           |            |   |   |   |   |   |   |   |   |           |               |
|---|---|-----------|---------------|-----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---------------|
|   | <div> <div>Prosentase Keselarasan Target Indikator Sasaran RPJMD dengan Target Indikator sasaran Renstra Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan</div> <div>Prosentase Keselarasan Program RPJMD dengan Program Renstra Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan</div> <div>Prosentase Keselarasan Target Indikator Program RPJMD dengan Target Indikator Program Renstra Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan</div> <div>Prosentase Keselarasan Sasaran RPJMD dengan sasaran RKPDP Lingkup Bidang Fisik Prasarana</div> <div>Prosentase Keselarasan Target Indikator Sasaran RPJMD dengan Target Indikator sasaran RKPDP Lingkup Bidang Fisik Prasarana</div> <div>Prosentase Keselarasan Program RPJMD dengan Program RKPDP Lingkup Bid. Fisik Prasarana</div> <div>Prosentase Keselarasan Target Indikator Program RPJMD dengan Target Indikator Program RKPDP Lingkup Bidang Fisik Prasarana</div> <div>Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam APBD pada Seluruh SKPD terkait</div> </div> |           |               |           |            |   |   |   |   |   |   |   |   |           |               |
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  | Tersedianya dokumen money pembangunan prasarana wilayah dan SDA   | 1 dokumen | 10.000.000    | 1 dokumen | 8.412.000  | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 dokumen | 18.412.000    |
| Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | Terlaksananya rapat koordinasi tentang prasarana wilayah dan SDS Terlaksananya koordinasi perencanaan prasarana dan wilayah SDA   | 4 kali    | 98.999.200    | -         | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 kali    | 98.999.200    |
| Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air  | Rapat koordinasi perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah dan sumber daya air   | -         | -             | 4 kali    | 13.215.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 kali    | 13.215.400    |
| Analisis Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam                           | Dokumen KLHS RPJMD kota Banjarbaru<br>Dokumen review Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Kota Banjarbaru<br>Review dokumen srategi sanitasi kota<br>Dokumen analisis perkembangan perumahan kota Banjarbaru<br>Dokumen perencanaan sarana utilitas bawah tanah kota Banjarbaru<br>Dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh perkotaan   | 1 dokumen | 2.712.000.800 | -         | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 dokumen | 2.712.000.800 |

|  |  |     |   |            |               |            |               |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |
|--|--|-----|---|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Koordinasi Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Lingkungan Hidup       | Terlaksananya Rapat koordinasi perencanaan pembangunan Bidang pemukiman dan lingkungan hidup Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi   | -   | - | 10 kali    | 15.529.000    | 10 kali    | 22.881.000    | -                     | -             | -                     | -             | -                     | -             | 20 kali               | 38.410.000    |
|  | Jumlah SKPD Yang diasistansi untuk menselaraskan Sasaran Pada Renstra Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU bidang Cipta Karya dengan RPJMD                                       | -   | - | -          | -             | -          | -             | 4 Sasaran             | 22.881.200    | 4 Sasaran             | 24.025.260    | 4 Sasaran             | 25.226.523    | 4 Sasaran             | 72.132.983    |
|  | Jumlah SKPD Yang diasistansi untuk menselaraskan Target Indikator Sasaran pada Renstra Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU bidang Cipta Karya dengan RPJMD                      |     |   |            |               |            |               | 9 Indikator Sasasaran |               | 9 Indikator Sasasaran |               | 9 Indikator Sasasaran |               | 9 Indikator Sasasaran |               |
|  | Jumlah SKPD Yang diasistansi untuk menselaraskan Program pada resntra Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU bidang Cipta Karya dengan RPJMD                                       |     |   |            |               |            |               | 16 Program            |               | 16 Program            |               | 16 Program            |               | 16 Program            |               |
|  | Jumlah SKPD Yang diasistansi untuk menselaraskan Target Indikator Program pada resntra Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU bidang Cipta Karya dengan RPJMD                      |     |   |            |               |            |               | 17 Indikator          |               | 17 Indikator          |               | 17 Indikator          |               | 17 Indikator          |               |
|  | Jumlah SKPD Yang diasistansi untuk menselaraskan Sasaran pada RKPД Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU bidang Cipta Karya dengan RPJMD  |     |   |            |               |            |               | 4 Sasaran             |               | 4 Sasaran             |               | 4 Sasaran             |               | 4 Sasaran             |               |
|  | Jumlah SKPD Yang diasistansi untuk menselaraskan Target Indikator Sasaran pada RKPД Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU bidang Cipta Karya dengan RPJMD                         |     |   |            |               |            |               | 9 Indikator Sasaran   |               | 9 Indikator Sasaran   |               | 9 Indikator Sasaran   |               | 9 Indikator Sasaran   |               |
|  | Jumlah SKPD Yang diasistansi untuk menselaraskan Program pada RKPД Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU bidang Cipta Karya dengan RPJMD  |     |   |            |               |            |               | 16 Program            |               | 16 Program            |               | 16 Program            |               | 16 Program            |               |
|  | Jumlah SKPD Yang diasistansi untuk menselaraskan Target Indikator Program pada RKPД Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU bidang Cipta Karya dengan RPJMD                         |     |   |            |               |            |               | 17 Indikator          |               | 17 Indikator          |               | 17 Indikator          |               | 17 Indikator          |               |
|  | Jumlah SKPD bidang Permukiman & Lingkungan Hidup yang kegiatannya termonitor dan dievaluasi melalui rapat monev dan peninjauan lapangan  |     |   |            |               |            |               | 3 SKPD                |               | 3 SKPD                |               | 3 SKPD                |               | 3 SKPD                |               |
| Penyusunan Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Lingkungan Hidup       | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Permukiman & Lingkungan Hidup yang tersusun  | N/A | - | 10 Dokumen | 536.350.100   | 15 dokumen | 639.207.677   | 20 Dokumen            | 639.805.300   | 25 Dokumen            | 671.795.565   | 30 Dokumen            | 705.385.343   | 35 dokumen            | 3.192.543.985 |
| Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sarana Prasarana dan Wilayah Sumber Daya Air yang berkualitas  | N/A | - | 1 dokumen  | 1.917.493.500 | 3 Dokumen  | 1.988.911.323 | -                     | -             | -                     | -             | -                     | -             | 4 dokumen             | 3.906.404.823 |
|  | Jumlah SKPD Yang diasistansi untuk menselaraskan Sasaran Pada Renstra Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas PUPR Bidang Bina Marga, Bid.Tata Ruang, Bid.SDA, Bid.Konstruksi dengan RPJMD | N/A | - |            |               |            |               | 4 Sasaran             | 2.121.313.500 | 4 Sasaran             | 2.227.179.175 | 4 Sasaran             | 2.338.388.134 | 4 Sasaran             | 6.686.880.809 |

|   |                     |               |                     |             |                     |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |               |
|---|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|
| Jumlah SKPD Yang diasistensi untuk menselaraskan Target Indikator Sasaran pada Renstra Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas PUPR Bidang Bina Marga, Bid.Tata Ruang, Bid.SDA, Bid.Konstruksi dengan RPJMD | N/A                 | -             |                     |             |                     |             | 9 Indikator Sasaran  |             | 9 Indikator Sasaran  |             | 9 Indikator Sasaran  |             | 9 Indikator Sasaran  |               |
| Jumlah SKPD Yang diasistensi untuk menselaraskan Program pada resntra Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas PUPR Bidang Bina Marga, Bid.Tata Ruang, Bid.SDA, Bid.Konstruksi dengan RPJMD                  | N/A                 | -             |                     |             |                     |             | 25 Program           |             | 25 Program           |             | 25 Program           |             | 25 Program           |               |
| Jumlah SKPD Yang diasistensi untuk menselaraskan Target Indikator Program pada resntra Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas PUPR Bidang Bina Marga, Bid.Tata Ruang, Bid.SDA, Bid.Konstruksi dengan RPJMD | N/A                 | -             |                     |             |                     |             | 36 Indikator Program |             | 36 Indikator Program |             | 36 Indikator Program |             | 36 Indikator Program |               |
| Jumlah SKPD Yang diasistensi untuk menselaraskan Sasaran pada RRPD Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas PUPR Bidang Bina Marga, Bid.Tata Ruang, Bid.SDA, Bid.Konstruksi dengan RPJMD                     | N/A                 | -             |                     |             |                     |             | 4 Sasaran            |             | 4 Sasaran            |             | 4 Sasaran            |             | 4 Sasaran            |               |
| Jumlah SKPD Yang diasistensi untuk menselaraskan Target Indikator Sasaran pada RRPD Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas PUPR Bidang Bina Marga, Bid.Tata Ruang, Bid.SDA, Bid.Konstruksi dengan RPJMD    | N/A                 | -             |                     |             |                     |             | 9 Indiaktor Sasaran  |             | 9 Indiaktor Sasaran  |             | 9 Indiaktor Sasaran  |             | 9 Indiaktor Sasaran  |               |
| Jumlah SKPD Yang diasistensi untuk menselaraskan Program pada RRPD Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas PUPR Bidang Bina Marga, Bid.Tata Ruang, Bid.SDA, Bid.Konstruksi dengan RPJMD                     | N/A                 | -             |                     |             |                     |             | 25 Program           |             | 25 Program           |             | 25 Program           |             | 25 Program           |               |
| Jumlah SKPD Yang diasistensi untuk menselaraskan Target Indikator Program pada RRPD Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas PUPR Bidang Bina Marga, Bid.Tata Ruang, Bid.SDA, Bid.Konstruksi dengan RPJMD    | N/A                 | -             |                     |             |                     |             | 36 Indikator Program |             | 36 Indikator Program |             | 36 Indikator Program |             | 36 Indikator Program |               |
| Jumlah SKPD bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA yang kegiatannya termonitor dan dievaluasi melalui rapat monev dan peninjauan lapangan  | N/A                 | -             |                     |             |                     |             | 3 SKPD               | 3 SKPD      |                      | 3 SKPD      |                      | 3 SKPD      |                      |               |
| Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sapras Wilayah dan SDA yang tersusun   | N/A                 | -             |                     |             |                     |             | 13 Dokumen           | 16 Dokumen  |                      | 19 Dokumen  |                      | 19 Dokumen  |                      |               |
| Persentase kajian/penelitian dan pengembangan yang teraplikasi  | 100%                | 1.107.000.000 | 100                 | 204.375.000 | 100%                | 197.362.800 | 100%                 | 236.534.800 | 100%                 | 266.473.065 | 100%                 | 268.260.354 | 100%                 | 2.280.006.019 |
| Terlaksananya diseminasi hasil penelitian kota Banjarbaru   | 3 kali              | 356.750.000   | 2 kali              | 27.318.400  | -                   | -           | -                    | -           | -                    | -           | -                    | -           | -                    | -             |
| Jumlah kajian/penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi yang terlaksana   | 2 Kajian/Penelitian | -             | 4 Kajian/Penelitian | -           | 6 Kajian/Penelitian | 24.515.600  | 8 Kajian/Penelitian  | 24.515.600  | 10 Kajian/Penelitian | 25.741.380  | 12 Kajian/Penelitian | 27.028.449  | 12 Kajian/Penelitian | 485.869.429   |

|  |  |  |  |           |             |           |             |           |             |           |             |            |             |            |             |             |               |
|--|--|--|--|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|
|  |  | Jaringan Penelitian  | Penyelenggaraan jaringan penelitian kota Banjarbaru Seminar/sosialisasi Rakorda jaringan penelitian tahun 2016 | 1 kali    | 429.774.800 | 1 kali    | 10.750.000  | 1 kali    | 9.528.000   | -         | -           | -          | -           | -          | -           | -           |               |
|  |  |  | Jumlah SKPD yang menerima kegiatan sosialisasi hasil rakor jaringan penelitian                                 | 10 SKPD   | -           | 10 SKPD   | -           | 10 SKPD   | -           | 10 SKPD   | 9.528.000   | 10 SKPD    | 10.004.400  | 10 SKPD    | 10.504.620  | 10 SKPD     | 480.089.820   |
|  |  | Penelitian dan Pengembangan Daerah                             | Terselenggaranya kegiatan penelitian   | 2 judul   | 320.475.200 | -         | -           | -         | -           | -         | -           | -          | -           | -          | 2 judul     | 320.475.200 |               |
|  |  | Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan    | Jumlah kajian/penelitian dan pengembangan bidang sosial ekonomi dan pemerintahan yang terlaksana               | 2 Dokumen | -           | 4 Dokumen | 166.306.600 | 6 Dokumen | 163.319.200 | 8 Dokumen | 202.491.200 | 10 Dokumen | 230.727.285 | 12 Dokumen | 230.727.285 | 12 Dokumen  | 993.571.570   |
|  |  | Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi | Jumlah/kajian penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi yang terlaksana                         | N/A       | -           | 1 Dokumen | 34.625.000  | 4 Dokumen | 287.637.200 | 7 Dokumen | 272.465.200 | 10 Dokumen | 267.526.935 | 13 Dokumen | 292.739.646 | 13 Dokumen  | 1.154.993.981 |
|  |  |  | Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah   | N/A       |             | N/A       |             | N/A       |             | 5 SKPD    |             | 5 SKPD     |             | 5 SKPD     |             | 5 SKPD      |               |
|  |  |  | Jumlah Kebijakan hasil kerjasama yang telah diterapkan di daerah   | N/A       | -           | N/A       |             | N/A       |             | 4 Dokumen |             | 5 Dokumen  |             | 6 Dokumen  |             | 6 dokumen   |               |